



# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**2019  
-  
2023**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PERKEBUNAN  
2019

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pelayanan dinas, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 22 April 2019

Kepala Dinas,

**Ir. UJANG RACHMAD, M.Si**  
NIP. 19690120 199403 1 014

## DAFTAR ISI

---

	Halaman.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan .....	10
2.2 Sumberdaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	42
<b>BAB III. Permasalahan dan Isu</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	61
3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian .....	62
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	66
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	73
<b>BAB IV. Tujuan dan Sasaran .....</b>	75
<b>BAB V. Strategi dan Kebijakan .....</b>	81
<b>BAB VI. Perencanaan Program Kegiatan dan Pendanaan</b>	
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .....	89
<b>BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang .....</b>	101
<b>BAB VIII. P e n u t u p .....</b>	109

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman.</b>
Tabel 2.1 Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2017 .....	22
Tabel 2.2 Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	23
Tabel 2.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Elektronik berdasarkan Kondisi Barang Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	24
Tabel 2.4 Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2017) .....	27
Tabel 2.5 Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan 2013 - 2017.....	27
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018.....	29
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 .....	30
Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017 .....	30
Tabel 2.9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 .....	31
Tabel 2.10 Rekapitulasi Rata-Rata Pertumbuhan Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 .....	31
Tabel 2.11 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....	34
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 .....	37
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kelompok Belanja Tahun 2014-2018 .....	41
Tabel 3.1 Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2018 .....	47
Tabel 3.2 Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2018 .....	49
Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....	56
Tabel 3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan Sektor Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Timur .....	67

Tabel 3.5	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur .....	67
Tabel 3.6	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur .....	69
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Disbun Prov. Kaltim Berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	71
Tabel 3.8	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	72
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....	80
Tabel 5.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 .....	85
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 .....	87
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 .....	90
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	102

# DAFTAR GAMBAR

---

	<b>Halaman.</b>
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	13
Gambar 2.2 Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 .....	27
Gambar 2.3 ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur tahun 2018.....	28
Gambar 2.4 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan Rakyat Tahun 2014 - 2018.....	28
Gambar 2.5 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018 .....	32
Gambar 2.6 Luas Areal Perkebunan Menurut Pola di Kalimantan Timur Tahun 2018 .....	32
Gambar 2.7 Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam dan Produksi Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 .....	33
Gambar 3.1 Permasalahan yang Dihadapi di Sektor Perkebunan .....	46
Gambar 3.2 Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Langkah dan Operasional Pembangunan Perkebunan Tahun 2020 – 2024 .....	65
Gambar 4.1 Kedudukan Strategis Perkebunan Kalimantan Timur .....	77
Gambar 4.2 Cascading IKU Daerah Provinsi dan IKU Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....	78
Gambar 4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .....	79
Gambar 5.1 Strategi Pembangunan Kebun Berkelanjutan .....	83

# Bab 1.

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian Propinsi Kalimantan Timur, subsektor perkebunan memiliki peran yang penting dalam kontribusi terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja, penerimaan ekspor dan penerimaan pajak. Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus mengikuti dinamika yang berkembang.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas NAWACITA yang wajib dilaksanakan untuk pengembangan subsektor perkebunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencakup 2 (dua) Agenda Prioritas, yaitu: (1) **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional** dengan *sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan, dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan*; dan (2) **Mewujudkan kemandiri ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik** dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran pokok sub agenda prioritas ini adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga.

Pada periode RPJMD 2013-2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan seluruh masyarakatnya telah bersepakat melakukan transformasi ekonomi sebagai jalan keluar atas permasalahan dan kesadaran untuk melakukan perubahan dalam pembangunan ekonomi yang sejak era tahun 70-an telah bergantung pada eksploitasi SDA tak terbarukan, kini mulai dialihkan ke pembangunan ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya alam terbarukan dengan menitikberatkan pada

upaya peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir. Untuk mendukung strategi tersebut, subsektor perkebunan memainkan peran yang sangat penting, mengingat perkebunan terutama kelapa sawit, menjadi komoditas unggulan penting dalam menyediakan bahan baku untuk industri *oleochemical* sebagai strategi hilirisasi industri yang akan dikembangkan. Selain itu, subsektor perkebunan juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, pembangunan perkebunan di Kaltim adalah pembangunan perkebunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *green economy* sebagai terjemahan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2013-2018 telah berupaya untuk memperkuat lini subsektor perkebunan sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menciptakan: (1) ***Terwujudnya perkebunan yang tangguh*** melalui keberhasilan sistem di subsektor perkebunan yang ditopang oleh infrastruktur, kebijakan, komponen pendukung dan efisiensi struktur mekanisme sehingga peningkatan hasil-hasil perkebunan dapat dinikmati oleh konsumen terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Timur; dan (2) ***Dukungan terhadap pengembangan agroindustri dan ekonomi hijau*** melalui ketersediaan berbagai komoditi unggulan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk-produk agroindustri dan sumbangan subsektor perkebunan sebagai sumber daya alam terbaharukan sehingga berperan aktif dalam pembentukan ekonomi hijau.

Kebijakan tersebut diatas dilanjutkan pada RPJMD periode 2019-2023, dimana sektor perkebunan akan memainkan peran langsung yang penting dalam mengemban amanah untuk mensukseskan **Visi Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat** melalui ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mensukseskan misi ke 2 sektor perkebunan akan berperan penting pada perubahan pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui demikian juga mengurangi kesenjangan pembangunan antar

daerah di Kalimantan Timur melalui penciptaan ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur pekebunan, menyediakan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang, menciptakan sistem ekonomi partisipatif dengan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan usaha perkebunan. Demikian pula sektor perkebunan memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.

Sedangkan untuk mensukseskan misi ke 4 sektor perkebunan akan berperan dalam melalui upaya pembangunan perkebunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan secara ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan. Secara aktif disiplin dalam pemanfaatan ruang dan meningkatkan efiseiensi pemanfaatan ruang melalui upaya penataan dan penertiban perijinan sektor perkebunan.

Strategi pengembangan komoditas-komoditas perkebunan unggulan di Kalimantan Timur diprioritaskan pada upaya peningkatan produktivitas daripada upaya perluasan melalui program peningkatan produksi dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi pada lahan dengan cadangan karbon rendah, diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas dibidang manajemen dan sekretariat.

Semua kebijakan dan strategi tersebut dituangkan dalam rencana Strategis Dinas Perkebunan Prov. Kaltim sebagai amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Kemudian, pada Pasal 1 Ayat (29) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra

Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini juga berdasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya sekaligus menjadi titik awal perencanaan pembangunan subsektor perkebunan di masa mendatang dengan memperhatikan bidang-bidang terkait lainnya sebagai pendukung pencapaian tujuan pembangunan sektoral.

Perencanaan perkebunan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini juga disusun dengan mengacu kepada : rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang wilayah, kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi dan sosial budaya, kondisi pasar dan tuntutan globalisasi. Dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, tepat sasaran serta efisien maka kebutuhan pembangunan perkebunan dapat terpenuhi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor perkebunan agar mampu bersaing dalam menghadapi perubahan ekonomi global saat ini dan masa mendatang, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan berbagai program kegiatan yang bersolusi, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan menuju arah perbaikan yang positif secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Meskipun masih dijumpai berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan pembangunan yang kian kompleks. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan kinerja setiap elemen Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih terarah, efektif dan efisien dalam mewujudkan *Kalimantan Timur yang Berdaulat dalam Pemberdayaan Ekonomi*

*Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan serta Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.*

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dirumuskan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur; dan
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 ini adalah sebagai dasar bagi setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh *stakeholders* dalam melaksanakan program dan kegiatan subsektor perkebunan periode 2019–2023 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pekebun Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

- a) Mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang mengiringi, sasaran strategis pembangunan, serta bagaimana upaya pencapaian tujuan pembangunan subsektor perkebunan dalam lima tahun mendatang;
- b) Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan subsektor perkebunan yang berkelanjutan periode 2019-2023;
- c) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya; dan
- d) Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

##### **Bab I       Pendahuluan**

Menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

##### **Bab II       Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023.

##### **Bab III      Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Menjelaskan tentang hasil identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dalam jangka menengah berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD terkait.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

**Bab VIII Penutup**

Berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

## Bab 2. **Gambaran Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerahnya, termasuk dukungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur perangkat daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan dan tugas pemantauan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, khususnya di subsektor perkebunan yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Dengan demikian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas segala capaian kinerja pembangunan subsektor perkebunan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor perkebunan saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor perkebunan di masa yang akan datang.

Sebagai upaya pencapaian visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kinerja staf dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* secara kontinyu dan konsisten di setiap tahapan program kegiatannya. Upaya tersebut membuahkan hasil sebagaimana terlihat dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 yang menunjukkan perkembangan cukup baik, meski masih terdapat beberapa poin penting yang harus dipercepat progres pencapaiannya pada periode RPJMD 2018 - 2023. Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

sebagai bentuk terjemahan dari pelaksanaan RPJMD 2019-2023 khususnya  ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan***  dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Adapun gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 dapat dilihat dari hasil analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan**

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, dimana setiap elemennya memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan.

Dalam perjalanan kinerjanya hingga saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejarah perkembangan organisasi yang cukup panjang. Diawali dengan didirikannya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan kemudian Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang dari Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Pada tahun 1963, kedua lembaga tersebut digabung menjadi Dinas (Jawatan) Karet. Memasuki awal Pelita I (April 1969), Dinas Karet berubah nama menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur melalui Perda Nomor 06 Tahun 1978.

Enam tahun kemudian, sebagai penyempurnaan dari Perda Nomor 06 Tahun 1978 disusunlah Perda Nomor 06 Tahun 1984 dimana nama Dinas Perkebunan Rakyat berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 Tahun 2001 yang dua tahun kemudian disempurnakan lagi melalui Perda Nomor 04 Tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2004, Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur berubah nama hingga periode sekarang menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan struktur organisasi tata laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran perkebunan berkelanjutan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Komoditi, membawahi :
  1. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;

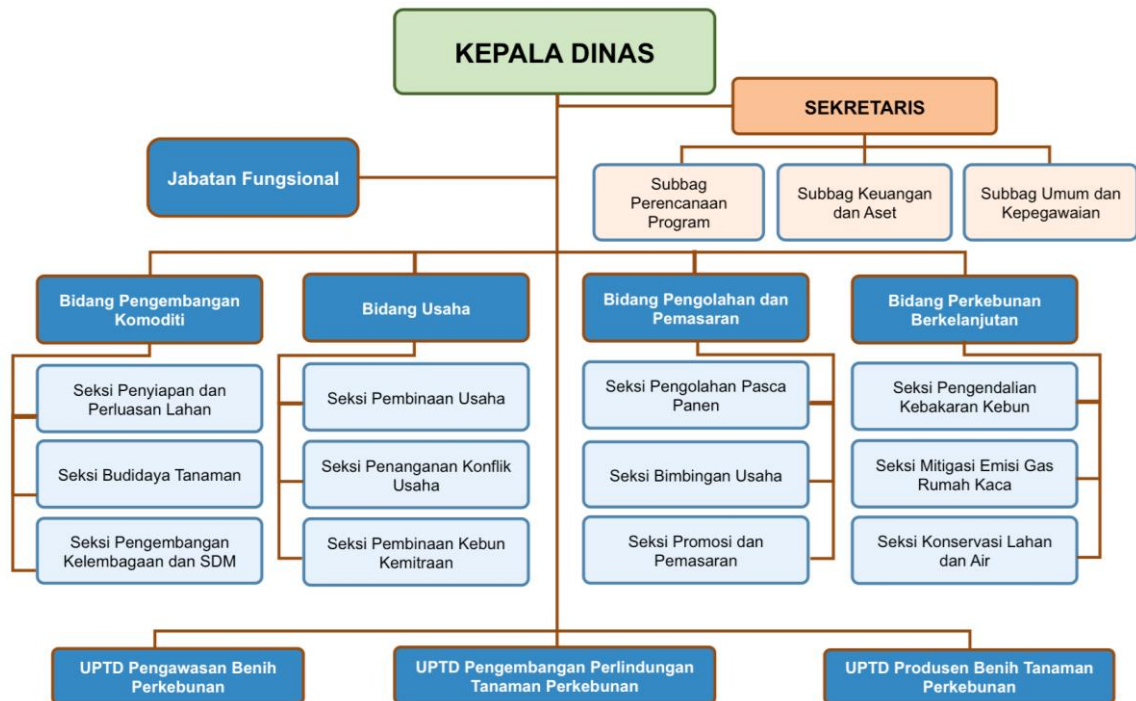
2. Seksi Budidaya Tanaman; dan
3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Usaha, membawahi :
  1. Seksi Pembinaan Usaha;
  2. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
  3. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi :
  1. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
  2. Seksi Bimbingan Usaha; dan
  3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- f. Bidang Perkebunan Berkelanjutan, membawahi :
  1. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
  2. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
  3. Seksi Konservasi Lahan dan Air.
- g. Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

  - a. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, membawahi:
    1. Seksi Tata Usaha;
    2. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih; dan
    3. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih.
  - b. UPTD Pengembangan Tanaman Perkebunan, membawahi:
    1. Seksi Tata Usaha;
    2. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH; dan
    3. Seksi Pengendalian OPT.
  - c. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan, membawahi:
    1. Seksi Tata Usaha;
    2. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
    3. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah.

Adapun struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**



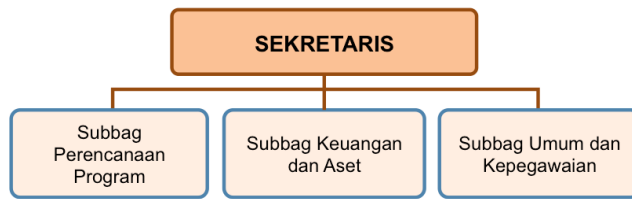
Adapun uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari setiap elemen organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memiliki tugas pokok dalam membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan dengan membawahi Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan strategi dan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan, meliputi: pengembangan dan peningkatan produksi komoditas perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pembinaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

**b. Sekretaris**



Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Perkebunan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

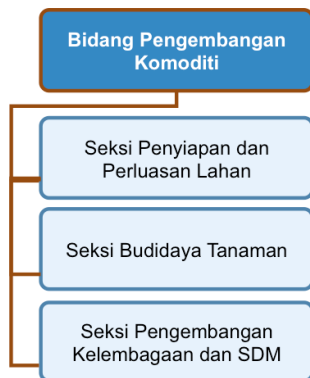
kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 3) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. *Subbagian Perencanaan Program*, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perkebunan;
2. *Subbagian Keuangan dan Aset*, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah dan Negara; dan
3. *Subbagian Umum dan Kepegawaian*, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.

**c. Bidang Pengembangan Komoditi**



Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas pokok bidang pengembangan komoditi adalah merencanakan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang

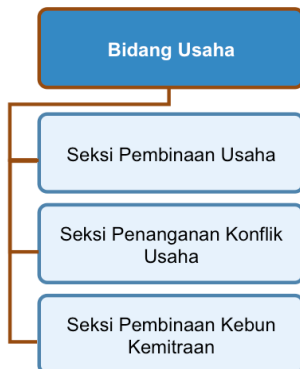
Pengembangan Komoditi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
- 2) Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
- 3) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
- 5) Perencanaan dan penyediaan alsintan di bidang perkebunan;
- 6) Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
- 7) Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang pengembangan komoditi membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi.

1. *Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan*, mempunyai tugas mempersiapkan lahan dan petani untuk pengembangan dan peningkatan produksi komoditas perkebunan.
2. *Seksi Budidaya Tanaman*, mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan kebutuhan budidaya tanaman untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan.
3. *Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia*, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan dan ketenagakerjaan serta pengembangan metode/informasi perkebunan.

#### d. Bidang Usaha



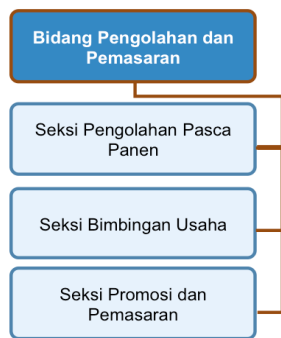
Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang usaha memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjalankan fungsi :

- 1) Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
- 2) Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- 4) Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;
- 5) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
- 6) Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
- 7) Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
- 8) Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;
- 9) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Usaha membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha.

1. *Seksi Pembinaan Usaha*, mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perijinan usaha perkebunan.
2. *Seksi Penanganan Konflik Usaha*, mempunyai tugas menangani konflik usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.
3. *Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan*, mempunyai tugas memfasilitasi kemitraan usaha perkebunan.

**e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran**



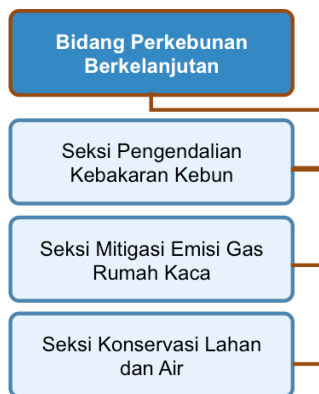
Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Bidang Pengolahan dan Pemasaran adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 2) Pembinaan dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
- 3) Mengkoordinasikan dan menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
- 4) Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
- 5) Memfasilitasi pelayanan informasi pasar dan mempromosikan produk komoditas perkebunan;
- 6) Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 8) Menerapkan dan mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- 9) Mengaplikasi dan menyebarluaskan teknologi tepat guna dalam pengembangan pengolahan hasil perkebunan;
- 10) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 11) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran.

1. *Seksi Pengolahan Pasca Panen*, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pasca panen.
2. *Seksi Bimbingan Usaha*, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penguatan kelembagaan usaha pengolahan hasil perkebunan.
3. *Seksi Promosi dan Pemasaran*, mempunyai tugas mempromosikan dan mengembangkan pemasaran olahan hasil perkebunan.

**f. Bidang Perkebunan Berkelanjutan**



Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan perkebunan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang

Perkebunan Berkelanjutan melaksanakan fungsi :

- 1) Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- 2) Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- 3) Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
- 4) Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
- 5) Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
- 6) Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
- 7) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

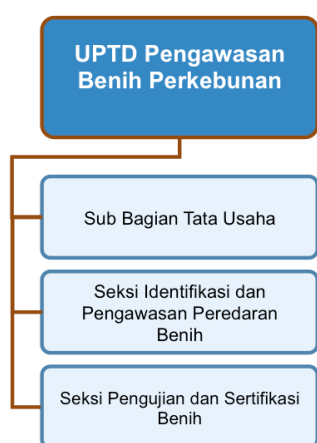
Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan.

1. *Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun*, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kebakaran kebun.
2. *Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca*, mempunyai tugas melaksanakan upaya-upaya mitigasi, pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca dari usaha perkebunan.
3. *Seksi Konservasi Lahan dan Air*, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan konservasi lahan dan air.

#### g. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

#### h. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan



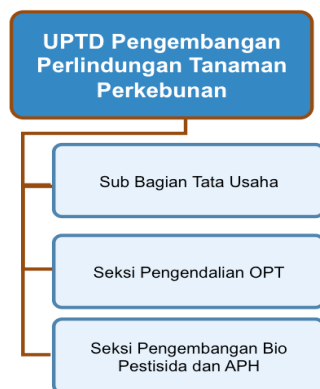
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 105 Tahun 2016, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi program, dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengendalian pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- 2) pengkoordinasian kegiatan, pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
- 3) penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
- 4) pengsertifikasian bibit kebun plasma/kemitraan;
- 5) pengkoordinasian tugas penanganan kasus benih ilegal;
- 6) penyusunan laporan dan pendokumentasian;
- 7) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 8) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 9) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu :

1. *Subbagian Tata Usaha*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan aset.
2. Seksi Identifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih.
3. *Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih*, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih.

**i. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**



UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang,

pengamatan dalam rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Memproduksi dan mengembangkan bio pestisida dan APH;
- 2) Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;
- 3) Menyebarakan dan memasarkan bio pestisida dan APH;
- 4) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan bio pestisida dan APH;
- 5) Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
- 7) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- 8) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; serta
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:

1. *Subbagian Tata Usaha*, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diuraikan pada tugas dan fungsi subbagian tata usaha di atas.
2. *Seksi Pengendalian OPT*, memiliki tugas mengembangkan teknologi dan melaksanakan pengendalian OPT.
3. *Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH*, mempunyai tugas memproduksi Bio pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH).

**j. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**



UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam menyiapkan bahan

tanam perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program kerja dan melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 2) Melaksanakan pengendalian, perumusan kebijakan pelayanan kebutuhan benih masyarakat;
- 3) Memproduksi, memelihara dan mengembangkan kebun koleksi, Kebun Induk, Pohon Induk Terpilih (PIT), dan Blok Penghasil Tinggi (BPT);
- 4) Melakukan kerja sama dengan sumber benih;
- 5) Melaksanakan penyebaran informasi/ sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyakan pembibitan tanaman;
- 6) Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar serta semusim dan rempah;
- 7) Menyiapkan bahan tanam perkebunan;
- 8) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman

Perkebunan (PBTP), yaitu:

1. *Subbagian Tata Usaha*, memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada unit kerja di UPTD.
2. *Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar*, mempunyai tugas menyiapkan bahan tanaman tahunan dan penyegar serta pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi.
3. *Seksi Tanaman Semusim dan Rempah*, mempunyai tugas Menyiapkan bahan tanaman semusim dan rempah serta pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang berkuantitas dan berkualitas sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018, jumlah keseluruhan SDM Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 92 (sembilan puluh dua) orang, dimana 53 (lima puluh tiga) PNS Laki-laki dan 39 (tiga puluh sembilan) PNS perempuan, dan pegawai honorer/PPT sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang terbagi 9 (Sembilan) laki-laki dan 21 (dua puluh satu) perempuan. Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**per 31 Desember 2018**

Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	L	P	IV	III	II	I	S-3	S-2	S-1	Dipl.	SLTA	SLTP	SD
<b>PNS</b>	53	39	15	62	15	0	1	19	40	3	29	2	0
<b>Pegawai Honor/PTT</b>	9	21	0	0	0	0	0	0	24	1	5	0	0
<b>Jumlah PNS + Honor</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (2018)

Data komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis, mengingat sebagian besar SDM berpendidikan sarjana, meskipun masih ada yang tamatan SLTP (2 orang). Namun demikian dengan semakin besarnya tuntutan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan mengharuskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga setiap aparatur kedepannya diharapkan akan memiliki kualifikasi dan spesifikasi khusus di bidang pertanian (khususnya subsektor perkebunan) sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dan UPTD agar tercipta suasana profesionalitas dalam bekerja namun tetap berada pada koridor pencapaian visi Dinas Perkebunan dan visi Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran maupun lapangan merupakan suatu kebutuhan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kelengkapan dan kualitas sarana prasarana akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, baik dari sisi administrasi maupun lapangan yang erat kaitannya langsung dengan petani perkebunan (pekebun). Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, baik itu yang berasal dari anggaran APBD maupun APBN, dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN	NILAI
1	Tanah	463.664,00	m <sup>2</sup>	9.819.615.218
2	Peralatan dan Mesin	1.644,00	Unit	14.426.176.595
3	Gedung dan Bangunan	107.251,35	m <sup>2</sup>	17.129.626.261
4	Aset Tetap Lainnya	59,00	Buah	102.896.000

*Sumber: LAKIP, 2017*

Berikut merupakan rekapitulasi sarana dan prasarana elektronik berdasarkan kondisi barang pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2.3**

**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Elektronik Berdasarkan Kondisi Barang**

**Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang	No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Keadaan Barang
1	AC Split	30	Baik	36	Mesin Penyedot Air	1	Baik
2	Alat komunikasi Radio HF/FM	5	Baik	37	Mesin Potong Rumput	3	Baik
3	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	38	Mesin Proses Lain-lain	1	Baik
4	Audio Master Control Unit	1	Baik	39	Mic Conference	31	Baik
5	Camera CCTV	24	Baik	40	Microphone	14	Baik
6	Camera Electronic	14	Baik	41	Mixer PVC	1	Baik
7	Camera Film	6	Baik	42	Monitor	3	Baik
8	Computer Compatible	4	Baik	43	Note Book	71	Baik
9	Dental Field Elektronik	1	Baik	44	Overhead Projektor	1	Baik
10	Digital Audio Recorder	20	Baik	45	PC Unit	24	Baik
11	Dispenser	4	Baik	46	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Baik
12	Display	4	Baik	47	Peralatan Mini Komputer	2	Baik
13	Equalizer	1	Baik	48	Peralatan Personal Komputer	3	Baik
14	Facsimile	2	Baik	49	Peralatan studio Visual Lain	3	Baik
15	Global Positioning System	24	Baik	50	Personal Komputer (Lab)	27	Baik
16	Handy Cam	11	Baik	51	Pesawat Telephone	14	Baik
17	Handy Talky	4	Baik	52	Pile Driver Lain-lain	3	Baik
18	Jam Mekanis	3	Baik	53	Pilling Tester	5	Baik
19	Kabel Listrik	10	Baik	54	Power Amplifier	1	Baik
20	Kipas Angin	2	Baik	55	Power Supply	1	Baik
21	Kompor Gas	2	Baik	56	Printer	59	Baik
22	Laptop	10	Baik	57	Prople Proyektor Toyo Serie	8	Baik
23	Layar film	5	Baik	58	Scanner	15	Baik
24	Loudspeaker	71	Baik	59	Server	1	Baik
25	Mesin absen	2	Baik	60	Software Aplikasi	1	Baik
26	Mesin Calculator	1	Baik	61	Sound System	1	Baik
27	Mesin Cuci	1	Baik	62	Teletype Scanner	1	Baik
28	Mesin Foto Copy	1	Baik	63	Televisi	8	Baik
29	Mesin Hitung Elektronik	2	Baik	64	Tustel	1	Baik
30	Mesin Jilid	1	Baik	65	(UPS)	43	Baik
31	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik	66	Vacum Evaporator	1	Baik
32	Mesin Ketik Manual Std	1	Baik	67	Video Monitor	1	Baik
33	Mesin Pengering	1	Baik	68	Video Tape Recorder Portable	2	Baik
34	Mesin Penghalus	1	Baik	69	Wireless	2	Baik
35	Mesin Penghisap Debu	1	Baik				

Sumber : data olahan, 2017

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencukupi kebutuhan. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah komputer (PC & Notebook) dengan jumlah pegawai, jumlah komputer (PC & Notebook) sebanyak 127 buah dengan jumlah pegawai 122 orang sehingga setiap pegawai mendapat fasilitas 1 komputer. Fasilitas printer juga tersedia pada setiap subbidang/subbagian. Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar perolehannya adalah di bawah tahun 2015. Banyak aset seperti komputer dan printer masa manfaatnya sudah lebih 5 tahun sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara data dengan kondisi di lapangan sehingga masih dibutuhkan pengadaan komputer pada tahun 2019 dan penggantian komputer yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan datang.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018**

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Kawasan non hutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalan, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas ± 5,6 Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas ± 4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ± 2,5 Juta Ha.

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2018 terdapat ±2,5 Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas ±1,1 Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah diidentifikasi melalui citra satelit, baru ±650 Ribu Ha yang kondisi

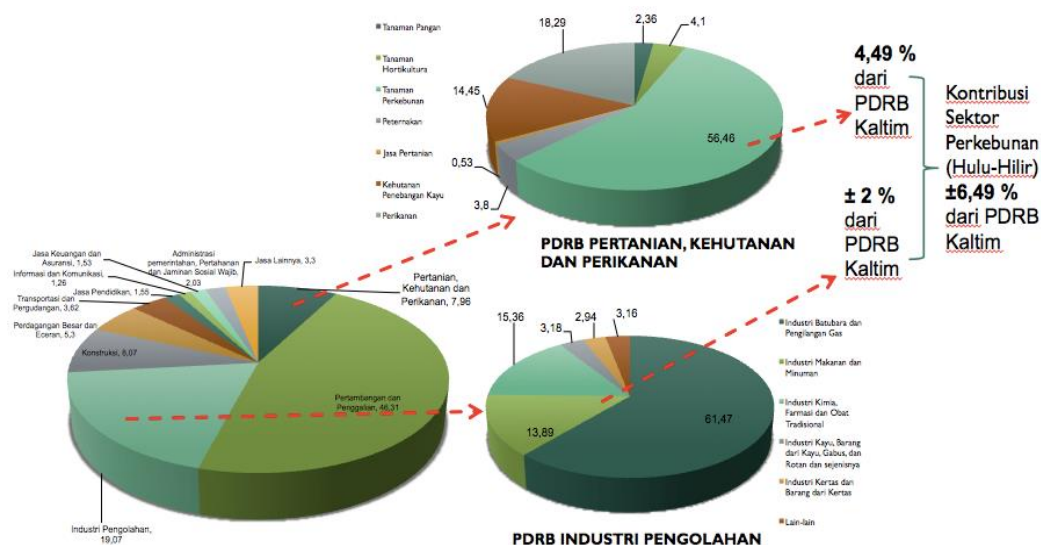
eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya HGU, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ±907 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

### **2.3.1. Capaian Indikator Kinerja**

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pelayanan (*performance results*) dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Gambar 2.2

Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Kalimantan Timur Tahun 2017



Berdasarkan pada gambar di atas, terlihat bahwa subsektor perkebunan dari hulu hingga ke hilir dan pengolahan CPO memiliki nilai kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Timur sebesar 6,49% dan melibatkan kurang lebih 334.743 tenaga kerja perkebunan.

Tabel 2.4  
Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (2012-2017)

Sektor/Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,47	5,65	7,00	7,72	8,22	7,96
	1 Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	3,22	3,36	4,55	4,89	5,34	5,35
	a Tanaman Pangan	0,21	0,22	0,23	0,24	0,19	0,19
	b Tanaman Hortikultura	0,26	0,26	0,28	0,33	0,36	0,33
	c <b>Tanaman Perkebunan</b>	<b>2,47</b>	<b>2,59</b>	<b>3,75</b>	<b>3,98</b>	<b>4,43</b>	<b>4,49</b>
	d Peternakan	0,24	0,25	0,26	0,29	0,32	0,30
	e Jasa Pertanian dan Perburuan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,19	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15
	3 Perikanan	1,07	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46

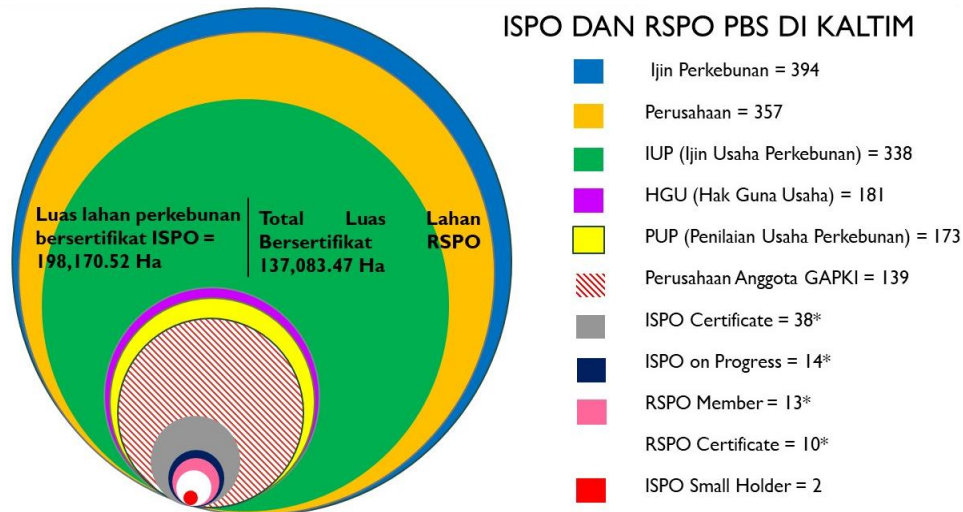
Struktur perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh tanaman perkebunan yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 sebesar 2,47 naik menjadi 4,49 pada 2017.

Tabel 2.5  
Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai (miliar rupiah)	11,591	12,835	13,721	14,151	15,324
Persentase (%)		10.73	6.90	3.13	8.29
Pertumbuhan		1,244	886	430	1,173

Sedangkan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Pada 2017 peningkatan mencapai 8,29%.

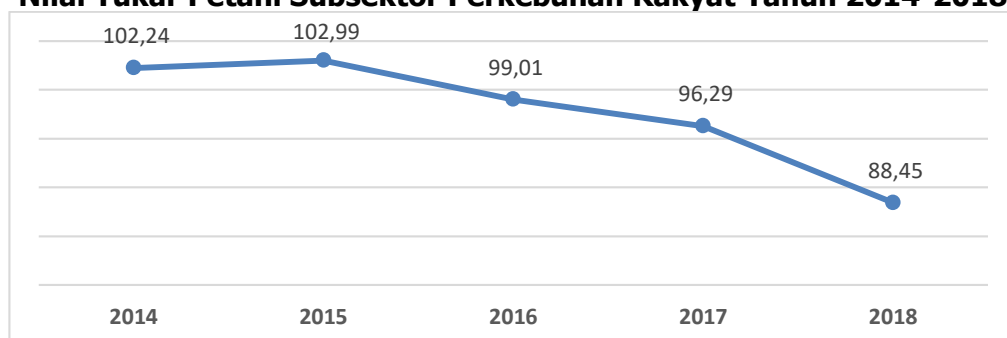
**Gambar 2.3.**  
**ISPO dan RSPO PBS di Kalimantan Timur Tahun 2018**



Dari 357 Perusahaan di Kalimantan Timur, sampai dengan tahun 2018 sebanyak 38 Perusahaan telah mendapat sertifikat ISPO dengan luas 198.170,52 HA atau sekitar 16,62% dari total luas perkebunan sawit di Kalimantan Timur.

Kemudian, jika dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP), selama rentang tahun 2014 hingga 2018, NTP subsektor perkebunan rakyat terlihat cenderung menurun. NTP tertinggi terdapat pada tahun 2015 senilai 102,99 yang kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka terendah di tahun 2018 senilai 88,45 sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.4.**  
**Nilai Tukar Petani Subsektor Perkebunan Rakyat Tahun 2014-2018**



**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2014-2018**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>1</b>	<b>Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan (Ton/Tahun)</b>																		
	Jumlah produksi kelapa sawit (ton per tahun)				9.600.000	11.200.000	12.400.000	14.832.500	18.000.000	9.628.072	10.812.106	11.418.110	13.164.130	14.480.742	1,00	0,97	0,92	0,89	0,80
	Jumlah produksi karet (ton per tahun)				55.216	57.752	60.318	85.738	93.250	63.281	65.738	62.106	63.510	66.361	1,15	1,14	1,03	0,74	0,71
	Jumlah produksi kakao (ton per tahun)				8.085	8.550	9.028	4.148	3.850	4.053	3.948	2.751	2.435	2.508	0,50	0,46	0,30	0,59	0,65
	Jumlah produksi kelapa dalam (ton per tahun)				643	7.496	8.301	13.457	10.930	11.424	12.457	11.078	13.647	14.056	17,77	1,66	1,33	1,01	1,29
	Jumlah produksi lada (ton per tahun)				6.331	689	7.464	8.364	7.420	6.704	6.923	4.727	6.057	6.299	1,06	10,05	0,63	0,72	0,85
<b>2</b>	<b>Tingkat Produktivitas Komoditi Perkebunan (Ton/Ha/Tahun)</b>																		
	Tingkat produktivitas kelapa sawit (ton/ha per tahun)				16,00	16,50	17,00	18,00	19,00	19,24	17,39	14,95	16,69	17,49	1,20	1,05	0,88	0,93	0,92
	Tingkat produktivitas karet (ton/ha per tahun)				1,25	1,26	1,27	1,30	1,30	1,23	1,30	1,29	1,28	1,31	0,99	1,03	1,02	0,98	1,01
	Tingkat produktivitas kakao (ton/ha per tahun)				0,69	0,71	0,73	0,77	0,77	0,71	0,77	0,55	0,5	0,51	1,02	1,08	0,75	0,65	0,66
	Tingkat produktivitas kelapa dalam (ton/ha per tahun)				0,44	0,50	0,54	0,68	0,68	0,56	0,68	0,63	0,80	0,82	1,28	1,37	1,17	1,18	1,21
	Tingkat produktivitas lada (ton/ha per tahun)				1,29	1,31	1,33	1,10	1,10	1,03	1,06	0,72	0,99	0,98	0,80	0,81	0,54	0,90	0,89
<b>3</b>	<b>Penambahan LuasKebun (Hektar)</b>																		
	Luas kebun sawit ( hektar)				1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.230.000	1.300.000	1.020.072	1.090.106	1.150.078	1.192.342	1.251.959	0,85	0,78	0,72	0,97	0,96
	Luas kebun karet (hektar)				102.000	104.000	106.000	123.740	128.740	113.485	113.739	116.869	115.160	117.463	1,11	1,09	1,10	0,93	0,91
	Luas kebun kakao (hektar)				10.500	11.000	11.500	9.496	10.096	9.514	8.296	7.931	7.778	7.856	0,91	0,75	0,69	0,82	0,78
	Luas kebun kelapa dalam (hektar)				20.500	21.000	21.500	23.887	24.387	26.674	22.887	22.897	22.289	22.512	1,30	1,09	1,06	0,93	0,92
	Luas kebun lada (hektar)				9.500	1.000	10.500	11.061	11.781	9.497	9.606	9.382	9.012	9.376	1,00	9,61	0,89	0,81	0,80
<b>4</b>	<b>Persentase produk yang bersertifikasi (%)</b>				5	5	5	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>5</b>	<b>Persentase penerapan teknologi (%)</b>				5	5	5	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>6</b>	<b>Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan</b>				5	5	5	-	-	5	5	5	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-
<b>7</b>	<b>Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun</b>				6	4	4	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>8</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK/tahun</b>				5	5	5	-	-			5	-		0,00	0,00	1,00	-	-
<b>9</b>	<b>Presentasei emisi yang turunkan dari BAU (Business as usual) (%)</b>				-	-	-	25	25	-	-	-	25	35	-	-	-	1,00	1,40
<b>10</b>	<b>Presentase sumber air dan HCV (High Conservation Value) yang terlindungi (%)</b>				-	-	-	50	50	-	-	-	25	51	-	-	-	0,50	1,02

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 indikator kinerja yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya adalah komoditi kelapa sawit baik perluasan, produksi maupun produktivitas. Komoditi berikutnya yang mengalami kenaikan adalah karet. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu adalah komoditi kakao, kelapa dalam serta lada. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat tercapai pada akhir periode.

**Tabel 2.7**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi :				
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	14.832.500	13.164.310	88,75
	- Karet	Ton/Tahun	85.738	63.510	74,07
	- Kakao	Ton/Tahun	4.148	2.435	58,70
	- Kelapa dalam	Ton/Tahun	13.457	13.647	101,41
	- Lada	Ton/Tahun	8.364	6.057	72,42
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>79,07</b>

**Tabel 2.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun			Peningkatan/ Penurunan dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 (%)
			2015	2016	2017	
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi kelapa sawit	ton/tahun	10,812,893	11.418.110	13.164.310	15,29
	Jumlah produksi karet	ton/tahun	65,738	62.106	63.510	2,26
	Jumlah produksi kakao	ton/tahun	3,948	2.751	2.435	-11,49
	Jumlah produksi kelapa dalam	ton/tahun	12,457	11.078	13.647	23,19
	Jumlah produksi lada	ton/tahun	6,923	4.727	6.057	28,13

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa komoditi kelapa sawit dan komoditi karet produksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan produksi kelapa sawit antara tahun 2016 dan 2017 mencapai 15,29%, produksi karet dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 2,26%, produksi kelapa dalam dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 23,19% dan peningkatan produksi lada dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 28,13%. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan produksi dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah komoditi kakao. Kemudian, capaian kinerja tahun 2017 jika dibandingkan dengan target akhir renstra

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi kelapa sawit, komoditi kakao serta komoditi lada di tahun 2016 masih rendah perbandingannya dengan target akhir Renstra Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2017	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi kelapa sawit	ton/tahun	18.000.000	13.164.310	73,14
	Jumlah produksi karet	ton/tahun	93.250	63.510	68,11
	Jumlah produksi kakao	ton/tahun	3.850	2.435	63,25
	Jumlah produksi kelapa dalam	ton/tahun	10.930	13.647	124,85
	Jumlah produksi lada	ton/tahun	7.420	6.057	81,16

Meningkatnya produksi komoditi perkebunan tersebut antara lain diakibatkan dari adanya peningkatan luas areal perkebunan dari tahun 2013-2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

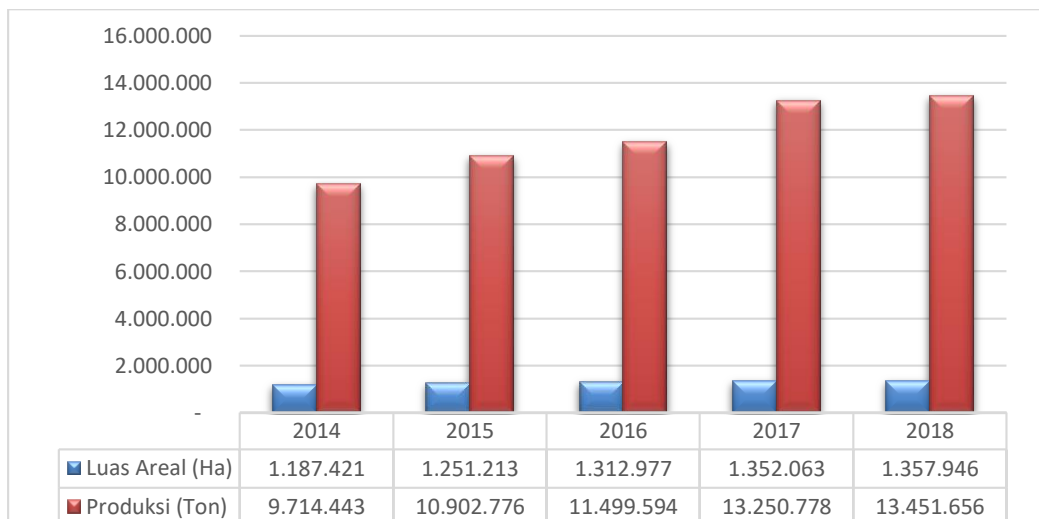
**Tabel 2.10**  
**Rekapitulasi Rata-Rata Pertumbuhan Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2014-2018**

No	Komoditi	2014		2015		2016		2017		2018		Rata - Rata	
		Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)	Luas (Ha)	Prod (Ton)
1.	Kelapa Sawit	1,020,413	9,628,072	1,090,106	10,812,893	1,150,078	11,418,110	1,192,342	13,164,310	1,199,407	13,371,756	4.15	8.69
2.	Karet	113,485	63,281	113,739	65,738	116,869	62,106	115,160	63,510	115,082	57,389	0.36	(2.25)
3.	Kakao	9,514	4,053	8,296	3,948	7,931	2,751	7,778	2,435	7,298	2,393	(6.33)	(11.53)
4.	Kelapa Dalam	26,674	11,424	22,887	12,457	22,897	11,078	22,289	13,647	21,840	12,746	(4.71)	3.64
5.	L a d a	9,497	6,704	9,606	6,923	9,382	4,727	9,012	6,057	9,021	6,484	(1.26)	1.68
6.	K o p i	4,823	562	3,567	399	3,049	392	2,725	325	2,550	297	(14.40)	(14.12)
7.	Lainnya	3,015	347	3,012	418	2,771	490	2,757	494	2,748	591	(2.23)	14.55
J u m l a h		1,187,421	9,714,443	1,251,213	10,902,776	1,312,977	11,499,654	1,352,063	13,250,778	1,357,946	13,451,656	3.43	8.61

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2019)

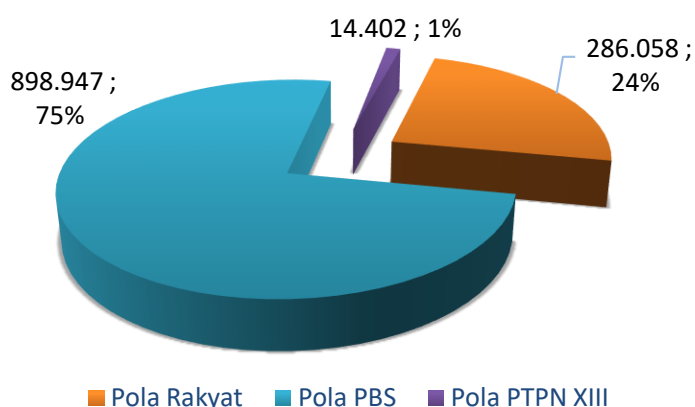
Perkembangan luas areal dan produksi perkebunan di Kalimantan Timur dari tahun 2014 hingga 2018 tersaji sebagai berikut :

**Gambar 2.5.**  
**Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perkebunan**  
**di Kalimantan Timur Tahun 2014-2018**



Kemudian jika dilihat dari pola produksi perkebunan yang selalu meningkat mengikuti luas areal dapat dilihat pada tahun 2014 luas areal yaitu 1,1 juta ha dengan produksi 9,7 ton kemudian di tahun 2015 menjadi 1,25 ha dengan produksi 10,9 ton. Dan tren perkembangan positif ini terus berlanjut hingga tahun 2018 dengan luas lahan 1,3 juta ha dengan produksi 13,4 ton.

**Gambar 2.6.**  
**Luas Areal Perkebunan Menurut Pola di Kalimantan Timur Tahun 2018**



Berdasarkan gambar di atas luas areal perkebunan di Kalimantan Timur terbagi menjadi 3 (tiga) pola, yaitu Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta dengan luas areal paling luas, 898.947 Ha atau sebesar 75% dari total luas areal perkebunan di Kalimantan Timur.

**Gambar 2.7.**  
**Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam & Produksi Perkebunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

PEMANFAATAN LAHAN			REALISASI TANAM DAN PRODUKSI		
No	Keterangan	Provinsi	No	Keterangan	Provinsi
1	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	3,269,561	1	Luas Komoditas Perkebunan	1,352,063
2	Lahan yang telah dibebani ijin perkebunan	3,089,234	2	Luas Tanam Sawit	1,192,342
	a.Luas (Ha)		3	Luas Tanam Kebun Inti	907,819
3	b.Jumlah Ijin	394	4	Luas Tanam Kebun Rakyat/Plasma (Ha)	284,523
	IUP		5	Luas Tanam Non Sawit (Ha)	159,725
4	a.Luas (Ha)	2,594,626	6	Persentase Luas Plasma saat ini (Permentan 98 tahun 2013 pasal 15)	20.68
	b.Jumlah Ijin		7	Produksi	2,890,212
5	HGU	1,112,515		a.CPO	
	a.Luas (Ha)	8	b.TBS	13,164,310	
b.Jumlah Ijin	181		a.Jumlah Pabrik Minyak Sawit	81	
IUP yang belum HGU	1,482,110		b.Kapasitas Terpasang (Ton)	4,500	
a.Luas (Ha)	157		c.Kapasitas Terpakai (Ton)	4,096	
6	b.Jumlah Ijin	494,609			
	Ijin lokasi yang tidak ada progres(Ha)				
7	a.Luas (Ha)	56			
	b.Jumlah Ijin				
8	Lahan yang belum dimanfaatkan(Ha)	730,903			
	Lahan yang belum dibebani ijin dikurangi luas kebun non sawit (Ha)				
		208,322			

Dari data di atas terlihat bahwa kebun rakyat memiliki 20,68 % total luas dari kebun inti yaitu 284.523 ha yang memerlukan outlet dan sarana transportasi dengan total produksi TBS 13,16 jt ton TBS dan CPO sebanyak 2,8 Juta Ton dihasilkan dari kebun yang sudah menghasilkan seluas 788.311 Ha. Dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan TBM seluas 400.000 akan menjadi TM sehingga akan ada tambahan jumlah produksi yaitu sekitar 4,45 juta ton dengan rata-rata produksi (14,95 ton/ha) sehingga diperkirakan total produksi pada 2022 akan menjadi 20,23 jt ton TBS.

Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan kebijakan strategis yang berdampak terhadap pembangunan secara keseluruhan, dari segi pembangunan manusia maupun infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, terutama dalam masa desentralisasi fiskal dan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Oleh karena itu kinerja pembangunan dituntut untuk dapat diukur dan dievaluasi oleh instansi yang berwenang dan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan hasil penilaian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.11**  
**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja		20,88	19,15
2.	Pengukuran Kinerja		15,63	14,06
3.	Pelaporan Kinerja		10,23	9,43
4.	Evaluasi Kinerja		3,88	5,33
5.	Capaian Kinerja		11,5	10,86
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>62,10</b>	<b>58,83</b>
	<b>Tingkat Akuntabilita Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>CC</b>

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Review terhadap Dokumen Renstra 2013-2018 telah dilakukan dengan memuat indikator tujuan dan target.
2. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja telah mengacu pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2013- 2018.
3. Perjanjian Kinerja menjadi acuan di dalam penyusunan kinerja hingga tingkat eselon IV sebagaimana terlihat dalam perjanjian kinerja tingkat eselon IV dimana sasaran strategis mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara terstruktur dan memadai. Data kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan data statistik perkebunan yang diperoleh dari pengumpulan data di Kabupaten/Kota. Prosedur pengumpulan dan penyusunan data statistik perkebunan telah terangkum dalam Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun konversi data maupun margin error mengacu pada Pedoman Data Statistik Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 sudah dapat mengidentifikasi kinerja Esselon III dan IV. Hal ini dibuktikan dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV yang mengacu pada sasaran strategis Perjanjian Kinerja Esselon II.
6. Target kinerja Esselon III dan IV telah dilakukan monitoring pencapaiannya melalui laporan bulanan dari setiap kegiatan.
7. Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama secara menyeluruh. Informasi kinerja dalam laporan kinerja bersumber dari Data

Statistik Perkebunan dan laporan kegiatan melalui prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga informasi tersebut dapat diandalkan.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 di atas, pencapaian sasaran strategis dalam penetapan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 secara umum belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target tersebut, diantaranya adalah minat masyarakat terhadap komoditi yang dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh, stabilitas harga, aspek pemasaran serta kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit serta pengaruh perubahan iklim.

Selain itu, jika dilihat dari kondisi ekonomi bidang pertanian subsektor perkebunan di Kalimantan Timur empat tahun terakhir secara konsisten mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai titik negatif pada dua tahun terakhir dalam posisi minus, hal ini juga terjadi pada subsektor tanaman perkebunan yang mengalami perlambatan hingga mencapai 3,14%. Penurunan LPE sektoral terjadi cukup signifikan dimana pada tahun 2012 subsektor tanaman perkebunan tumbuh sebesar 15,83% dan menjadi 3,14% dalam kurun waktu 5 tahun. Demikian pula, produksi tanaman perkebunan unggulan, utamanya kelapa, masih belum mengalami peningkatan produksi bahkan cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Perkebunan juga belum optimal dimana capaiannya mengindikasikan kesejahteraan pekebun belum mengalami peningkatan yang berarti. Cukup tingginya tenaga kerja pada sektor pertanian, menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan potensi SDM sektor pertanian khususnya pertanian tanaman perkebunan. Hasil analisis ini kedepan menjadi pekerjaan rumah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk diselesaikan, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

### **2.3.2. Realisasi Anggaran**

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan. Tabel 2.11 di bawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Dari tabel 2.11 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2013-2018, pendanaan program kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD dan

APBN. Perkembangan pagu anggaran yang bersumber dari APBD dari tahun 2013-2018 mengalami penurunan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 pagu anggaran sebesar Rp. 60.571.250.877,- dan pada tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp. 24.361.981.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran yaitu pada tahun 2014 mencapai 88% dan tahun 2018 mencapai 93%.

Realisasi belanja langsung yang bersumber dari dana APBD pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.119.167.239,- (97,38%) dari pagu Rp. 9.364.300.000,-. Dimana sisa-sisa dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyebab terjadinya silpa positif. Sedangkan realisasi belanja tidak langsungnya sebesar Rp. 22.632.849.008,-(92,90%) dari pagu Rp. 24.361.981.000,-. Hal ini disebabkan adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sedangkan pagu anggaran yang bersumber dari APBN dari tahun 2013-2018 juga mengalami penurunan maupun kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 pagu anggaran sebesar Rp. 9.136.032.000,- dan pada tahun 2018 turun menjadi Rp. 8.386.857.000,- dengan rasio antara realisasi dan anggaran yaitu pada tahun 2014 mencapai 71,47% dan tahun 2018 mencapai 84,87%. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa-sisa dari pengadaan barang dan jasa serta harga satuan yang tidak sesuai dengan harga di lapangan.

**Tabel 2.12**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2014-2018**

																	Rp. X 1000
Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Produktivitas	7.538.875	2.040.350	5.407.230	-	-	-	1.150.861	1.017.036	-	-	-	0,56	0,19	-	-	46,04	11,63
Program Perluasan Kebun Sawit	7.403.185	8.744.000	8.744.000	-	-	-	3.110.831	4.953.087	-	-	-	0,36	0,57	-	-	9,06	59,22
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	15.909.105	13.437.200	14.358.350	-	-	-	5.263.979	2.982.280	-	-	-	0,39	0,21	-	-	4,34	43,35
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	199.950	185.450	-	-	401.542	130.365	156.922	-	-	-	0,65	0,85	-	-	7,25	20,37
Program Pengembangan Data/Informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	4.798.200	3.254.900	3.500.000	-	-	-	2.124.467	1.942.949	-	-	-	0,65	0,56	-	-	12,32	8,54
Program Penanganan Konflik, Dan Gangguan Usaha Perkebunan	2.300.000	2.706.400	2.350.000	-	-	-	962.092	495.599	-	-	-	0,36	0,21	-	-	2,25	48,49
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	550.000	-	500.000	-	-	-	-	75.245	-	-	-	-	0,15	-	-	9,09	15,05
Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	-	173.300	348.300	-	-	-	-	118.736	-	-	-	-	0,34	-	-	100,98	34,09
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	961.000	1.073.340	1.413.840	-	-	-	757.569	559.723	-	-	-	0,71	0,40	-	-	21,71	26,12
Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan	608.000	166.100	166.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,34	-
Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	90.112	426.750	426.750	-	-	-	235.506	35.510	-	-	-	0,55	0,08	-	-	186,79	84,92
Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	1.807.500	1.194.050	1.470.520	-	-	-	419.181	643.269	-	-	-	0,35	0,44	-	-	5,39	53,46
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	2.984.500	1.744.000	2.000.000	-	-	-	1.152.589	769.895	-	-	-	0,66	0,38	-	-	13,44	33,20

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	60.000	-	60.000	-	-	-	-	15.045	-	-	-	-	0,25	-	-	-	25,07
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	1.023.765	1.940.540	2.807.250	-	-	-	1.154.107	2.469.710	-	-	-	0,59	0,88	-	-	67,11	113,99
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	5.179.115	2.433.210	2.366.900	-	-	-	1.283.478	1.342.178	-	-	-	0,53	0,57	-	-	27,87	4,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.469.312	4.319.820	4.350.020	-	-	3.542.343	3.587.741	3.676.559	-	-	0,79	0,83	0,85	-	-	1,32	1,88
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	6.916.000	10.832.310	6.146.020	-	-	2.967.077	9.011.676	1.623.017	-	-	0,43	0,83	0,26	-	-	6,68	60,87
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	310.780	285.560	285.560	-	-	271.883	71.296	329.926	-	-	0,87	0,25	1,16	-	-	4,06	144,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	956.810	1.007.960	1.007.960	-	-	750.640	647.333	528.891	-	-	0,78	0,64	0,52	-	-	2,67	16,03
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.619.900	1.570.900	1.570.900	-	-	1.457.591	1.171.711	1.266.678	-	-	0,90	0,75	0,81	-	-	1,51	5,75
Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/	12.217.500	-	-	-	-	6.037.464	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	10.469.500	-	-	-	-	1.460.734	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27.286.070	-	-	-	-	17.598.437	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	1.881.000	-	-	-	-	1.338.707	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	7.211.380	-	-	-	-	3.277.828	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	3.068.692	3.583.686	-	-	-	2.879.765	2.598.851	-	-	-	0,94	0,73	16,78	9,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	1.383.700	3.173.382	-	-	-	1.002.297	578.488	-	-	-	0,72	0,18	129,34	42,28
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	-	1.110.593	1.805.876	-	-	-	1.369.565	1.077.734	-	-	-	1,23	0,60	62,60	21,31
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	258.850	1.009.600	-	-	-	391.006	345.155	-	-	-	1,51	0,34	290,03	11,73
Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	-	-	-	-	7.446.950	-	-	-	-	184.531	-	-	-	-	0,02	-	-
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	-	-	-	55.500	244.000	-	-	-	55.447	-	-	-	-	1,00	-	339,64	100,00
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	-	-	-	82.900	1.909.500	-	-	-	82.893	253.425	-	-	-	1,00	0,13	2.203,38	205,73
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	-	-	-	78.430	243.100	-	-	-	77.225	275.111	-	-	-	0,98	1,13	209,96	256,25
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	-	-	-	103.700	974.900	-	-	-	103.621	41.718	-	-	-	1,00	0,04	840,12	59,74
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	331.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perluasan Kebun Sawit	-	-	-	-	1.217.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	-	-	-	458.400	7.759.450	-	-	-	434.205	922.495	-	-	-	0,95	0,12	1.592,72	112,46
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	-	49.000	825.050	-	-	-	48.538	-	-	-	-	0,99	-	1.583,78	100,00
Program Konservasi Lahan dan Air	-	-	-	73.000	507.000	-	-	-	72.083	296.773	-	-	-	0,99	0,59	594,52	311,71

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	343.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	-	-	-	-	687.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	-	-	-	155.000	954.700	-	-	-	151.796	143.487	-	-	-	0,98	0,15	515,94	5,47
Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	-	-	-	55.000	546.000	-	-	-	54.916	151.826	-	-	-	1,00	0,28	892,73	176,47
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	-	-	-	64.900	985.200	-	-	-	64.814	-	-	-	-	1,00	-	1.418,03	100,00
Program Pengendalian Kebakaran Kebun	-	-	-	84.000	444.250	-	-	-	83.938	-	-	-	-	1,00	-	428,87	100,00
Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	-	-	-	125.550	182.450	-	-	-	125.456	-	-	-	-	1,00	-	45,32	100,00
Program pengujian dan sertifikasi benih	-	-	-	134.000	218.900	-	-	-	133.564	571.588	-	-	-	1,00	2,61	63,36	327,95
Program Pengendalian OPT	-	-	-	88.800	250.000	-	-	-	84.235	55.893	-	-	-	0,95	0,22	181,53	33,65
Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	-	-	-	66.025	307.000	-	-	-	585.904	323.978	-	-	-	8,87	1,06	364,98	44,70
Program penyediaan bahan tanaman	-	-	-	203.960	821.450	-	-	-	455.045	1.298.115	-	-	-	2,23	1,58	302,75	185,27
<b>TOTAL</b>	<b>124.551.609</b>	<b>57.550.640</b>	<b>59.465.150</b>	<b>7.700.000</b>	<b>36.772.319</b>	<b>39.104.245</b>	<b>32.234.782</b>	<b>25.002.255</b>	<b>8.256.313</b>	<b>9.119.167</b>	<b>0,31</b>	<b>0,56</b>	<b>0,42</b>	<b>1,07</b>	<b>0,25</b>	<b>60,01</b>	<b>24,13</b>

**Tabel 2.13**

**Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kelompok Belanja Tahun 2014-2018**

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
I.	APBN															
1.	Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05)															
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	1,585,828,000	4,609,545,000	1,870,628,000	707,535,000	1,577,500,000	921,966,275	3,360,854,200	1,404,664,625	610,173,250	1,467,531,700	0.58	0.73	0.75	0.86	0.93
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	3,097,397,000	11,298,361,000	33,030,632,000	7,168,872,000	6,809,357,000	1,976,005,700	8,023,643,075	1,780,023,750	5,384,083,950	5,650,195,903	0.64	0.71	0.05	0.75	0.83
	Jumlah Satker (05) DK+TP	4,683,225,000	15,907,906,000	34,901,260,000	7,876,407,000	8,386,857,000	2,897,971,975	11,384,497,275	3,184,688,375	5,994,257,200	7,117,727,603	0.62	0.72	0.09	0.76	0.85
	Dana TP Mandiri Kabupaten Kutai Barat	2,181,607,000	2,889,408,000	-	-	-	1,821,694,000	2,088,986,750	-	-	-	0.84	0.72			
2.	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Satker 07)															
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	427,600,000	619,175,000	-	-	-	347,638,300	564,423,750	-	-	-	0.81	0.91	-	-	-
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	556,400,000	-	-	-	-	497,349,700	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-
	Jumlah Satker (07) DK+TP	984,000,000	619,175,000	-	-	-	844,988,000	564,423,750	-	-	-	0.86	0.91	-	-	-
3.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08)															
	- Dana Dekonsentrasi (DK)	450,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	228,479,470	211,602,100	263,604,400	-	-	0.51	0.71	0.88	-	-
	- Dana Tugas Pembantuan (TP)	837,200,000	-	-	-	-	736,561,300	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-
	Jumlah Satker (08) DK+TP	1,287,200,000	300,000,000	300,000,000	-	-	965,040,770	211,602,100	263,604,400	-	-	0.75	0.71	0.88	-	-
II.	APBD															
	- Belanja Tidak Langsung	14,736,095,409	15,448,594,499	17,182,452,200	16,418,598,000	14,997,681,000	14,121,008,369	14,879,993,675	14,759,645,201	13,898,238,135	13,513,681,769	0.96	0.96	0.86	0.85	0.90
	- Belanja Langsung	45,835,155,468	41,585,000,000	26,237,166,000	8,703,000,000	9,364,300,000	39,104,244,926	32,234,781,689	25,002,254,780	8,256,313,248	9,119,167,239	0.85	0.78	0.95	0.95	0.97
	Jumlah APBD	60,571,250,877	57,033,594,499	43,419,618,200	25,121,598,000	24,361,981,000	53,225,253,295	47,114,775,364	39,761,899,981	22,154,551,383	22,632,849,008	0.88	0.83	0.92	0.88	0.93

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyusun kebijakan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan segala kekuatan, hambatan, tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat strategi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dinas teknis yang sebagian tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani perkebunan, harus memiliki pemikiran yang fokus (*focus minded*) pada pelayanan prima terhadap "konsumen" nya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah tantangan besar bagi Dinas Perkebunan untuk menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik. Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut:

### 1. Kekuatan (*Strength*) yang dimiliki :

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
- Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;
- Tersedianya potensi kawasan areal perkebunan;
- Hasil pembangunan sektor perkebunan selama ini; dan
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan sektor perkebunan.

### 2. Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki :

- Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
- Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan
- Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
- Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
- Adanya pengaruh globalisasi; dan
- Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi.

### 3. Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki :



- Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
- Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
- Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
- Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat; dan
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah.

4. Ancaman (*Treath*) yang dimiliki :

- Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan;
- Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
- Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang;
- Moratorium ijin pengembangan perkebunan;
- Isu emisi gas rumah kaca;
- Perubahan cuaca/iklim imbas dari *global warming*; dan
- Aksesibilitas kekawasan perkebunan masih terbatas.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang perkebunan;
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan secara optimal;
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja, baik internal maupun eksternal;
4. Optimalisasi sistem informasi *database* dalam mendukung pembangunan perkebunan;
5. Fokus pada pelaksanaan pembangunan perkebunan yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah;
6. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kebun;

7. Koordinasi internal maupun eksternal secara intensif;
8. Tingkatkan konsolidasi internal;
9. Meningkatnya komitmen dan motivasi kerja pegawai serta konsistensi kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan; dan
10. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas, didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif menjadikan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumber daya lahan dan pelaku usaha perkebunan semakin optimal.

## Bab 3. Permasalahan dan Isu

Sektor perkebunan memegang peran kunci dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, dalam pembangunan sektor perkebunan dihadapkan pada permasalahan dan isu-isu yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta global. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari permasalahan tersebut akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta hektare peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin usaha perkebunan yang diterbitkan 2,5 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,35 juta hektare, termasuk 1,1 juta hektare kelapa sawit. Masih terdapat 1.41 juta Ha areal ijin perkebunan yang belum ditanami.

Sektor perkebunan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik migas maupun non migas. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal.

Berbagai permasalahan diatas menyebabkan **“Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi, ekologi dan sosial-budaya untuk mensejahterakan masyarakat”**. Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

**Gambar 3.1**  
**Permasalahan yang Dihadapi di Sektor Perkebunan**



**1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan**

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami Konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai  $\pm 88,47\%$  lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur

ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas  $\pm$  3,08 Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar  $\pm$  1,32 Juta Ha atau 42% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada  $\pm$  58 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2018, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 394 ijin seluas 3.089.234 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.594.626 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2017 adalah 1.192.342 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,2 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

**Tabel 3.1**  
**Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
		Luas yang Telah Dibeberani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	Berau	314.581	207.314	123.604	92.650
2	Kutai Timur	791.203	749.947	35.568	352.882
3	Kutai Kertanegara	679.578	668.980	266.478	189.657
4	Kutai Barat	549.974	419.488	163.331	121.226
5	Mahakam Ulu	269.723	178.076	35.047	19.862
6	Penajam Paser Utara	136.031	136.726	31.589	30.406

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
		Luas yang Telah Dibebeani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	
1	2	3	4	5	6
7	Paser	348.144	234.094	134.899	101.116
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
	<b>Jumlah</b>	<b>3.089.234</b>	<b>2.594.626</b>	<b>1.112.515</b>	<b>907.819</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2019)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak clear dan cleannya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek landbanking yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum clear dan clean;
- Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;
- Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;
- Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;
- Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;
- Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik; dan
- Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasis IT dan spasial.

## 2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Sebagaimana dijelaskan di dalam RPJMD, keterbatasan lapangan usaha masyarakat berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,46% (4,49% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2014-2018 pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2017**

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)					Potensi berdasarkan PDKP
	2014	2015	2016	2017	2018	
Kelapa Sawit	14,76	15,39	14,47	15,72	16,57	20,00
Karet	1,38	1,38	1,33	1,34	1,22	1,67
Kakao	0,707	0,765	0,552	0,501	0,551	1,00
Kelapa Dalam	0,564	0,684	0,634	0,802	0,751	1,50
Lada	1,034	1,061	0,724	0,985	1,049	1,20
Kopi	0,229	0,215	0,243	0,256	0,244	1,30

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk di tingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan "**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**" dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;
- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;
- e. Kurang tersedianya benih yang berkualitas;
- f. Penggunaan benih yang ilegal;
- g. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- h. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

### **3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 159.725 Ha pada tahun 2017 dan 158.539 Ha pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami penurunan hingga mencapai 0,74%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan "**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal**" dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan
- d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani.

### **4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan**

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun



maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah

menjadi crude palm oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

**Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan**” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;
- b. Kurangnya pelatihan dan praktek mengolah mandiri oleh para pekebun;
- c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;
- d. Kurangnya Sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;
- e. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- f. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;
- g. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan
- h. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.

## **5. Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan**

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh perluasan areal perkebunan dianggap salah satu faktor meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan menurunnya keanekaragaman hayati (biodiversiti). Namun, informasi yang memadai untuk menghitung tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan peringkatnya dari seluruh sektor untuk seluruh provinsi belum dimiliki, tetapi hanya tersedia tingkat emisi dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut tahun 2001-2012 di mana Kalimantan Timur menduduki peringkat keenam dibanding provinsi lain se-Indonesia (KLHK, 2015). Emisi GRK Kalimantan Timur pada periode tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023, penurunan terutama terjadi karena terjadi emisi negatif (sekuistrasi bersih)



pada sektor perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut pada tahun 2014 serta kecenderungan menurunnya emisi dari sektor energi. Pengikatan karbon (sekuistrasi) bersih sebesar 23 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2014 pada sektor lahan terutama terjadi karena tingginya kebun yang dibangun di atas lahan semak belukar dan lahan terbuka. Sekuistrasi bersih tersebut berhasil menutup seluruh emisi GRK pada tahun 2014 dan membuat emisi akumulatif pada periode 2012-2015 dari perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut hanya sekitar 50 juta ton CO<sub>2</sub> atau sekitar 12,5 juta ton CO<sub>2</sub> per tahun.

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional dan nasioan dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan **"Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan "** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;
- b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;
- d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;
- e. Supply Chain produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;

- g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam; dan
- h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal.

## **6. Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah**

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.



Akar permasalahan **"Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah"** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota; dan
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik.

## **7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan**

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertanggung struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **"masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan"** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;

- c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal; dan
- f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana.

Dari analisa diatas, permasalahan yang dihadapi Dinas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019 - 2023**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Pembangunan perkebunan belum mewujudkan peran strategisnya secara ekonomis, ekologis dan sosial-budaya	Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagian perijinan di sektor perkebunan belum clear dan clean;</li> <li>b. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU belum optimal;</li> <li>c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan belum ada upaya pencabutan;</li> <li>d. Pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun masa pembangunan dan operasional belum dilakukan sebagaimana mestinya;</li> <li>e. Masih banyak terjadi konflik usaha perkebunan;</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>f. Koordinasi penerbitan ijin usaha perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Provinsi belum terlaksana dengan baik; dan</p> <p>g. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi, pengawasan dan pelaporan yang modern berbasis IT dan spasial.</p>
2		Rendahnya produktivitas kebun rakyat	<p>a. Keterbatasan permodalan;</p> <p>b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;</p> <p>c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;</p> <p>d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;</p> <p>e. Kurang tersedianya benih yang berkualitas;</p> <p>f. Penggunaan benih yang illegitim;</p> <p>g. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan</p> <p>h. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.</p>
3		Pengembangan komoditas perkebunan non sawit belum optimal	<p>a. Harga komoditas non sawit fluktuatif;</p> <p>b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;</p> <p>c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			d. Rantai pemasaran komoditas non sawit belum berpihak kepada petani.
4		Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan	<p>a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern berbasis IT;</p> <p>b. Kurangnya pelatihan dan praktek mengolah mandiri oleh para pekebun;</p> <p>c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana;</p> <p>d. Kurangnya Sosialisasi dan pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota;</p> <p>e. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;</p> <p>f. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang;</p> <p>g. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani; dan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			h. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik.
5		Meningkatnya tuntutan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan	<p>a. Adanya kampanye negatif terhadap kelapa sawit;</p> <p>b. Belum semua pihak memahami makna perkebunan yang berkelanjutan;</p> <p>c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang diperuntukkan bagi pembangunan perkebunan;</p> <p>d. Masih ada aktivitas pembangunan kebun rakyat di kawasan hutan;</p> <p>e. <i>Supply Chain</i> produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;</p> <p>f. Pengawasan dan penerapan Sanksi oleh penerbit izin usaha belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>g. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam; dan</p> <p>h. Pemanfaatan limbah cair untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6		Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;</li> <li>b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;</li> <li>c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial;</li> <li>d. Kurangnya dukungan SDM dan infrastruktur dalam pengelolaan data di Kabupaten/ Kota; dan</li> <li>e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik.</li> </ul>
7		Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan sektor perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;</li> <li>b. Perangkat Daerah (PD) yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;</li> <li>c. Mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/ Kota menyebabkan kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan perkebunan;</li> <li>d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			e. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan perkebunan belum optimal; dan f. Belum optimalnya dukungan SDM dan sarana prasarana.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023, maka Visi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

#### **"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"**

Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2019-2023 adalah :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Dari visi dan misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Dinas Perkebunan sekurang-kurangnya berhubungan dengan misi kedua dan keempat. Sesuai RPJMD periode 2019-2023 sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah untuk mensukseskan ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mensukseskan misi ke 2 sektor perkebunan akan berperan penting pada perubahan pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui demikian juga mengurangi Kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur melalui penciptaan ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan, menyediakan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang, menciptakan sistem ekonomi partisipatif dengan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan usaha perkebunan. Demikian pula sektor perkebunan memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.

Sedangkan untuk mendukung secara tidak langsung dalam mensukseskan misi ke 4 sektor perkebunan akan berperan dalam melalui upaya pembangunan perkebunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan secara ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan. Secara aktif disiplin dalam pemanfaatan ruang dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang melalui upaya penataan dan penertiban perijinan sektor perkebunan.

Dengan pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan akan memberikan daya dukung dalam meningkatkan daya saing produk yang berimbas pada perekonomian daerah. Dengan disiplin yang tinggi agar perkebunan juga dikuasai oleh masyarakat maka keberhasilan pembangunan perkebunan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam misi 2 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dengan pemanfaatan yang optimal, baik pemanfaatan sebagai bahan baku energi terbarukan maupun sebagai produk mentah dengan tanpa meninggalkan keseimbangan lingkungan akan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dengan hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan dan ikutannya dari perkebunan dapat dimanfaatkan maka kekhawatiran sementara pihak-pihak tertentu yang selalu menyuarakan bahwa perkebunan (khususnya kelapa sawit) berdampak buruk pada lingkungan tidak berdasar.

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian**

Tantangan pembangunan pertanian 2015-2019 adalah:

1. Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi;
2. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam;
3. Kondisi Perekonomian Global;
4. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi; dan
5. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian.

Sedangkan salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI adalah lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur memprioritaskan pengembangan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan nasional antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan lada.

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **"Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah"**

***Tinggi<sup>[1]</sup> Berbasis Sumberdaya Lokal<sup>[2]</sup> untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani<sup>[3]</sup>.***

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2015-2019, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "***Menjadi direktorat jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan***".

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 diantaranya adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Mengacu pada misi pembangunan nasional tahun 2015-2019, Kementerian pertanian menetapkan misi kementerian pertanian tahun 2015-2019 diantaranya :

- a. *Mewujudkan kedaulatan pangan;*
- b. *Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;*
- c. *Mewujudkan kesejahteraan petani; dan*
- d. *Mewujudkan reformasi birokrasi.*

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Misinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan produksi tanaman Perkebunan secara berkelanjutan;
2. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan;
3. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil Perkebunan secara berkelanjutan;
4. Menyediakan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha Perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik Perkebunan;
5. Mewujudkan sistem perlindungan Perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman Perkebunan dengan pendekatan Kawasan;
7. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
8. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman Perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan;
9. Mewujudkan sitem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas Perkebunan; dan
10. Mendorong pengembangan pemasaran produk Perkebunan di tataran domestic dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.

Sedangkan arah kebijakan, strategi, program dan langkah operasional pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Langkah Operasional**  
**Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024**



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan untuk pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan**  
**Sektor Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kabupaten/Kota	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	Realisasi pemakaian lahan hingga 2018 (Ha)
1	2	3	4
1	Berau	405.645	137.661
2	Kutai Timur	881.661	473.316
3	Kutai Kertanegara	715.397	253.013
4	Kutai Barat	487.288	190.451
5	Mahakam Ulu	275.725	22.721

No	Kabupaten/Kota	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	Realisasi pemakaian lahan hingga 2018 (Ha)
1	2	3	4
6	Penajam Paser Utara	80.758	65.995
7	Paser	398.945	200.258
8	Samarinda	22.186	2.757
9	Balikpapan	880	5.730
10	Bontang	1.076	161
	<b>Jumlah</b>	<b>3.269.561</b>	<b>1.352.063</b>

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perkebunan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur**

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Peruntukan Pengembangan Budidaya Perkebunan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan kritis	Kapasitas kelembagaan masyarakat pada wilayah pengembangan perkebunan belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pengembangan komoditi perkebunan
2.	Konsesi perusahaan perkebunan besar masuk dalam kawasan yang	Terjadinya konflik pemanfaatan lahan di beberapa perusahaan besar swasta/negara	Belum adanya kesepahaman dengan masyarakat sekitar konsesi perusahaan untuk menentukan	Adanya komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi, turut serta secara aktif mendampingi dan



No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	diakui sebagai hak ulayat		kebijakan dalam menetapkan kawasan budidaya perkebunan besar	memotivasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di Kabupaten

Dengan melihat tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa dalam pengembangan pengelolaan perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dan benar antara pemerintah daerah, masyarakat Kalimantan Timur, dan stakeholder. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan pengelolaan struktur ruang wilayah untuk perkebunan masih terjadi tumpang tindih dan penegakkan hukum perijinan lahan belum ditegakkan serta masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua stakeholder Kalimantan Timur.

### **Telaah Pola Ruang Wilayah**

Pemanfaatan ruang jangka menengah hanya didasarkan pada Pola Ruang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.



**Tabel 3.6**  
**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap**  
**Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur**

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan budidaya Non Kehutanan (KBNK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dikeluarkan ijin lokasi pengembangan budidaya tanaman perkebunan oleh Bupati/Walikota</li> <li>Tumpang tindih perkebunan, pertambangan dan lainnya</li> <li>Pola kemitraan pembangunan lahan masyarakat dengan Perusahaan besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan status legalitas perijinan melalui pembinaan usaha perkebunan</li> <li>Untuk peningkatan fungsi pengembangan budidaya tanaman perkebunan guna pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi</li> <li>Peningkatan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan terkait dengan pelayanan PD sudah sesuai dengan peruntukannya</li> <li>Memberikan arahan untuk pembangunan perkebunan yang lebih fokus sesuai dengan pola ruang fungsi dalam peruntukannya untuk jangka menengah</li> <li>Pembinaan dan pendampingan sistem kemitraan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan lahan untuk pembangunan perkebunan sesuai peruntukannya</li> <li>Pemberdayaan masyarakat disekitar PBS dengan pola revitbun non revitbun sebanyak 20%</li> <li>Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan melalui ketentuan maupun aturan (Permentan, Perda, Pergub)</li> <li>Menetapkan rencana kebun kemitraan dalam peta ijin lokasi perusahaan</li> </ul>
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	Perkebunan rakyat yang sudah termanfaatkan secara turun temurun banyak yang masuk dalam KBK	Perencanaan pola ruang dengan mengacu pada satu peta dasar yang sama ( <i>one map one data</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tertatanya pembangunan perkebunan sesuai dengan peruntukannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengusulkan alih fungsi lahan eksisting kearah APL (Areal Penggunaan Lain)</li> </ul>

Dengan melihat tabel diatas (Tabel 3.5 dan 3.6) melalui rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada pengkayaan Sumberdaya Alam. Melihat pola ruang saat ini, pola ruang memberikan dukungan penuh pada pengembangan areal tanaman. Dengan program pemanfaatan ruang yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangan kaltim green. Dengan melihat tabel 3.5 terlihat pada struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat dapat terlihat, mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan SDA semaksimal dan seoptimal mungkin dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat Kalimantan Timur.

Sehingga dengan pola ruang sesuai dengan tabel 3.6 diatas, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Instansi terkait dan *stakeholder* dapat mengembangkan dan membangun Kaltim (*green economy*) yang terpadu dan berkelanjutan.

### 3.4.2 Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur di PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disarikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan Pelayanan Disbun Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata ruang wilayah prov. kaltim yang belum selesai sampai saat ini</li> <li>• Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan pada daerah pengembangan perkebunan</li> <li>• Adanya kabupaten dalam pemberian perijinan untuk ijin usaha perkebunan tanpa rekomendasi dari Gubernur</li> <li>• Data base peta dasar, peta tematik dan potensi pengembangan perkebunan belum lengkap dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan pola ruang mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta.</li> <li>• Inkonsistensi pengambil kebijakan oleh stekholder dalam pemberian ijin usaha</li> <li>• Ketersediaan data dan informasi pendukung belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pengembalian keputusan dalam pemberian ijin</li> <li>• Kurang tersedianya peta citra landsat resolusi tinggi sebagai peta dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Perkebunan Prov. Kaltim mendorong untuk mempercepat proses review data tata ruang provinsi</li> <li>• Dinas perkebunan prov. kaltim dalam pembangunan perkebunan akan mensosialisasikan sesuai dengan peraturan menteri pertanian No. 98 tahun 2013</li> <li>• Tersedianya <i>one map, one police</i> yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG)</li> </ul>
2.	Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penetapan kawasan konservasi bernilai tinggi didalam konsesi usaha perkebunan oleh kepala daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua jasa usaha perkebunan memahami keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi diperkebunan</li> </ul>	Bimbingan teknis serta menetapkan mengenai keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, terlihat jelas bahwa daya dukung dan daya pengembangan perkebunan dalam masyarakat Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masih kurang.

Selain itu, ketegasan dan penegakkan hukum dalam hal pemberian ijin ataupun produk hukum lainnya belum disosialisasikan dan ditegakkan secara jelas. Sehingga pengembangan dan pengelolaan sektor perkebunan belum optimal.

**Tabel 3.8**  
**Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur dan**  
**Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pengembangan perkebunan</li> <li>2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup</li> <li>3. Kinerja layanan/jasa ekosistem</li> <li>4. Efisiensi pemanfaatan lahan</li> <li>5. Tingkat kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim</li> <li>6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah kebijakan rencana dan program yang menjadi focus dalam KLHS dalam pengembangan perkebunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi untuk tingkat provinsi dilihat dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan</li> <li>• Pemantapan lahan budidaya perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui usaha budidaya</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan, hukum melalui Permentan, Perda/ Pergub</li> <li>• Revitalisasi pembangunan perkebunan secara berkesinambungan</li> <li>• Perlindungan dan konservasi pemanfaatan lahan-lahan kritis untuk pembangunan perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemanfaatan daya dukung lahan kritis untuk pengembangan perkebunan berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Perencanaan makro untuk pembangunan perkebunan</li> <li>• Konservasi untuk HCV pada perkebunan besar untuk perlindungan keanekaragaman hayati</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan</li> <li>• Peningkatan usaha budidaya perkebunan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai dengan kearifan lokal</li> </ul>
Sisitem budidaya perkebunan yang rentan terhadap perubahan iklim	Memperhatikan isu-isu global tentang pembangunan perkebunan yang berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan	Optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian	Konservasi sumberdaya hayati dan penurunan emisi GRK

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.8) dapat terlihat aspek – aspek kajian dalam KLHS, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu dengan pengembangan kawasan perkebunan provinsi yang ditinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum. Dalam aspek kajian KLHS ini menandai bahwa pemanfaatan dan peningkatan dalam areal tanaman serta pemeliharannya menjadi landasan dalam pengoptimalan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya perkebunan. Aspek kajian KLHS ini sangat mendukung dalam memberi keseimbangan kegiatan manusia dengan alam. Dengan hal ini, aspek KLHS sangat memberi pengaruh pada

kondisi tanam yang akan memengaruhi hasil tanaman/perkebunan. Sehingga secara beruntun akan menimbulkan dampak pada sector-sektor lainnya. Dengan demikian, pemenuhan aspek pada KLHS ini sangat mendukung dalam pengembangan Program Kaltim Hijau (*green economy*).

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Di sektor perkebunan upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar, dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas. Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut. Sementara dilain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur melalui dana desa pada kawasan-kawasan tersebut. Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti banjir dan tanah longsor.

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan

lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari sektor perkebunan difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri perkebunan, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah perkebunan, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Pengembangan ekonomi produktif dilakukan dengan tetap menjaga kawasan-kawasan di wilayah perkebunan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT).

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan, meliputi :

1. Diperlukan tindakan penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
2. Peningkatan produktivitas kebun khususnya kebun swadaya;
3. Meningkatkan upaya kemitaraan antara dengan perusahaan perkebunan dengan penguatan kelembagaan pekebun yang baik;
4. Melakukan sosialisasi untuk mengkapanyekan pembangunan berkebunan di Kalimantan Timur dilakukan secara berkelanjutan baik di tingkat Regional, Nasional dan Global;
5. Memperbaiki sistem pengelolaan data perkebunan dan diseminasinya;
6. Membuka jalur pemasaran komoditas perkebunan hingga ke tingkat international; dan
7. Melakukan diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan.

## Bab 4 . Tujuan dan Sasaran

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis,

serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RPJMD 2019-2023 khususnya dalam pencapaian Misi 2 dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi 4. Peran sektor perkebunan dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Merubah pembentukan struktur ekonomi yang berbasiskan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur.
3. Penciptaan aktivitas ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur pekebunan.
4. Penyediaan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai bahan baku industri hilir dalam menciptakan nilai tambah.
5. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan melalui mengembangkan usaha perkebunan.
6. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.
7. Memperbaiki kualitas lingkungan dan berkontribusi aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan perlindungan areal bernilai konservasi tinggi.

**Gambar 4.1**  
**Kedudukan Strategis Perkebunan Kalimantan Timur**



Berdasarkan analisis diatas maka ditetapkan visi Dinas Perkebunan tahun 2019-2023 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Men-sejahterakan Masyarakat”** dengan 2 misi, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional; dan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023, sebagai berikut:

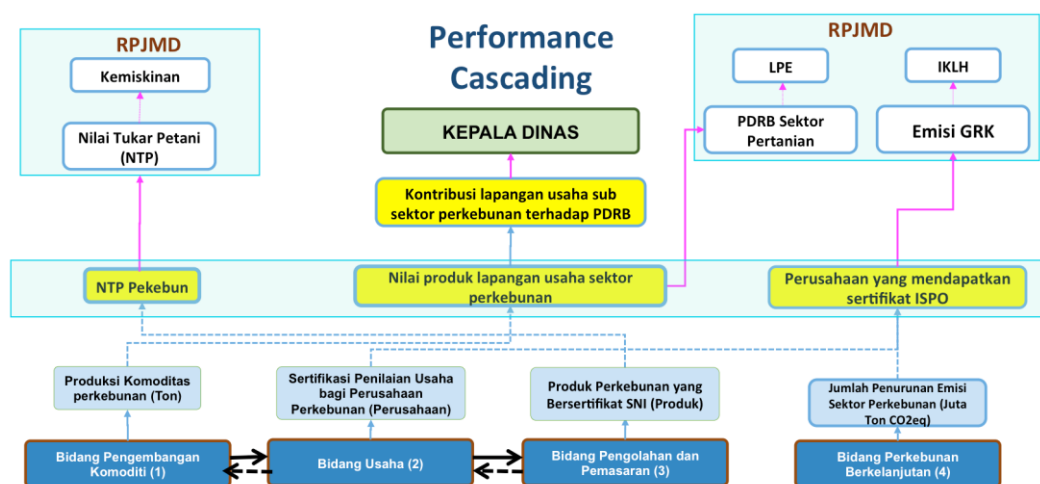
**“Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan”.**

Tujuan tersebut di ukur dengan indikator indikator tujuan nilai absolut PDRB sub sektor perkebunan. Penetapan tujuan tersebut konsisten dan mendukung strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi dominasi sektor pertambangan/penggalan dan pengolahan migas. Data menunjukkan bahwa di tahun 2017 mencapai 46,31%, sementara sektor pertanian dalam arti luas hanya berkontribusi 7,96% terhadap PDRB Prov. Kaltim dan sub sektor perkebunan berkontribusi 56,46% pada tahun 2017 terhadap sektor pertanian dalam arti luas tersebut maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan timur dalam periode 2019-2023 terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas agar dapat meningkatkan kontribusinya dalam PDRB Kaltim.

Disamping perannya yang semakin besar dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur sektor perkebunan diharapkan mampu menyerap tenaga pekebun yang lebih banyak dari tahun 2017 yang berjumlah 337.972 orang. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur yang di dukung oleh kondisi agroklimat dan ketersediaan lahan yang memadai harus mampu meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga diharapkan sub sektor perkebunan akan dapat menjadi penopang pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi terbarukan.

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memperhatikan kontribusi perkebunan terhadap sasaran pembangunan Daerah seperti pada gambar berikut :

**Gambar 4.2**  
**Cascading IKU Daerah Provinsi dan IKU Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

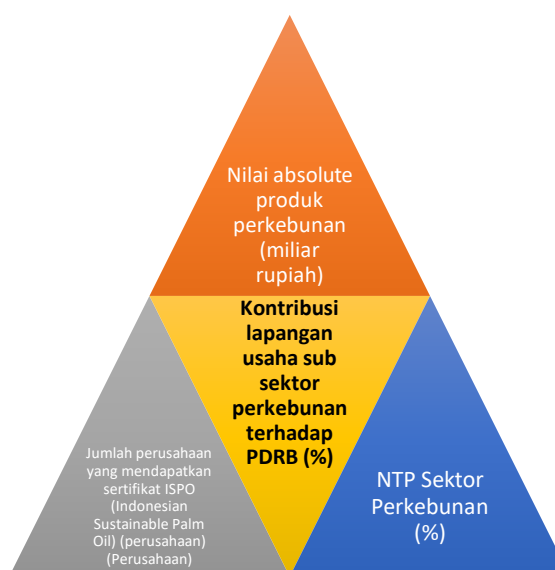


Maka ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan”** tersebut dicapai dengan sasaran :

1. **Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan**, dengan indikator :
  - Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)
2. **Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan**, dengan indikator :
  - Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) (Perusahaan)
3. **Meningkatnya kesejahteraan pekebun**, dengan indikator :
  - NTP Pekebun (%)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka ditentukan indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai ukuran tanggung jawab kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana pada gambar berikut :

**Gambar 4.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2023**



Selanjutnya, indikator tujuan dan sasaran beserta target tahun 2019-2023 dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2017*)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Target Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan</b>	<b>Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)</b>			<b>4,49</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
		Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544	18.773	20.087	21.493	22.997	22.997
		Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO ( <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> ) (Perusahaan)	38	43	48	53	58	63	63
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Pekebun (%)	88,45 (*Desember 2018)	89	92	95	98	100	100

## Bab 5. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra sehingga strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan, yaitu S–O (Strengths–Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perangkat daerah maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung visi **"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"** sesuai RPJMD periode 2019-2023 dan analisis peran sektor perkebunan dalam

mensukseskan  ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan***  dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlu dirumuskan Strategi dan Kebijakan sektor perkebunan secara konkrit dan lugas dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan baik internal, eksternal dan global.

Adapun peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Merubah pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur.
3. Penciptaan aktivitas ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur pekebunan.
4. Penyediaan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai bahan baku industri hilir dalam menciptakan nilai tambah.
5. Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan melalui mengembangkan usaha perkebunan.
6. Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.
7. Memperbaiki kualitas lingkungan dan berkontribusi aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan perlindungan areal bernilai konservasi tinggi.

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu 2019-2023. Strategi dan kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor perkebunan.

Gambar 5.1

Strategi Pembangunan Kebun Berkelanjutan



Prinsip pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur adalah **"Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *Green Economy*"** sebagai terjemahan misi ke 2 dan misi ke 4 RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dalam pelaksanaannya, strategi dan kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan perbaikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak pembangunan perkebunan.

Adapun Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
2. Mengutamakan peningkatan produktivitas daripada perluasan areal perkebunan
3. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan) untuk menghindari ketergantungan pada satu komoditas saja yang saat ini di dominasi oleh kelapa sawit;

4. Perluasan kebun baru diarahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah (semak belukar, tanah mineral);
5. Mengembangkan kemitraaan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan perkebunan;
6. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan;
7. Pengembangan dan penguatan kelembagaan Perkebunan;
8. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid;
9. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat; dan
10. Mendorong pemanfaatan biomassa Perkebunan untuk energi baru terbarukan.

Pelaksanaan Strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi Strategi dan Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung di desain untuk mencapai tujuan.

**Tabel 5.1.**  
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan**  
**Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**

<b>VISI :</b> <b>TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi/ Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan</b>	<b>Misi 1 : Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional</b>	
	1. Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi komoditi perkebunan</li> </ul>
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya</li> <li>• Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan</li> <li>• Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor</li> <li>• Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan</li> </ul>
	<b>Misi 2 :Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan</b>	
	1. Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit</li> </ul>
		Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat</li> </ul>

VISI : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT		
Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang</li> </ul>
		Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan</li> </ul>
	2. Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan</li> <li>• Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan</li> </ul>
		Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan hama dan penyakit</li> <li>• Efektivitas Mitigasi Emisi GRK</li> <li>• Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran</li> <li>• Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan</li> </ul>
	3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan</li> <li>• Penanganan konflik perkebunan</li> </ul>
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat</li> </ul>

**Tabel 5.2.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan**  
**Berdasarkan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III	Renja IV	Renja V
<b>Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan</b>	Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan	Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produksi komoditi perkebunan</li> </ul>					
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya</li> <li>Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan</li> <li>Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor</li> <li>Membangun outlet- outlet pemasaran produk olahan Perkebunan</li> </ul>					
		Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)	Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit					
		Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah	Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat					
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III	Renja IV	Renja V
		Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid	Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan					
	Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan</li> <li>Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan</li> </ul>					
		Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan hama dan penyakit</li> <li>Efektivitas Mitigasi Emisi GRK</li> <li>Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran</li> <li>Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan</li> </ul>					
	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan</li> <li>Penanganan konflik perkebunan</li> </ul>					
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat	Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat					

## Bab 6. **Perencanaan Program Kegiatan dan Pendanaan**

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dalam mengembangkan dan mengelola komoditas perkebunan yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023).

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan				Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1		5,4		5,7		6,0		6,3		6,3			
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	2.680.263.900	83	2.680.263.900	86	3.503.900.000	89	3.371.229.600	92	3.500.000.000	92	15.735.657.400	Sekretariat	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	2.680.263.900	12	2.680.263.900	12	3.503.900.000	12	3.371.229.600	12	3.500.000.000	12	15.735.657.400		Samarinda, Kukar
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	5	2.156.565.000	5	2.434.000.000	5	2.581.200.000	5	2.550.000.000	5	3.000.000.000	5	12.721.765.000	Sekretariat	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	15	24	1.303.450.000	18	1.453.000.000	21	1.453.000.000	24	1.400.000.000	27	1.500.000.000	114	7.109.450.000		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	853.115.000	12	981.000.000	12	1.128.200.000	12	1.150.000.000	12	1.500.000.000	12	5.612.315.000		Samarinda
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	1.992.775.000	20	2.291.605.000	20	2.291.605.000	20	2.000.000.000	20	2.600.000.000	100	11.175.985.000	Sekretariat	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	1.480.075.000	4	1.702.000.000	4	1.702.000.000	4	1.700.000.000	4	2.000.000.000	4	8.584.075.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4		4			
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12		12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	512.700.000	50	589.605.000	50	589.605.000	50	300.000.000	50	600.000.000	250	2.591.910.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah pakaian dinas (Stell)		460				460				460		1.380			

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	58,83	63	744.675.000	68	762.823.000	70	991.671.000	72	1.289.172.000	74	1.675.924.000	74	5.464.265.000	Sekretariat	
		3.03.01.10.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	50	10	334.665.000	10	327.083.000	10	425.209.000	10	552.771.000	10	718.603.000	50	2.358.331.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.10.02	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	20	4	410.010.000	4	435.740.000	4	566.462.000	4	736.401.000	4	957.321.000	20	3.105.934.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	327.160.000	83	526.234.000	86	370.662.387	89	497.570.650	92	573.254.380	92	2.294.881.417	UPTD PBP	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	327.160.000	12	526.234.000	12	370.662.387	12	497.570.650	12	573.254.380	12	2.294.881.417		Samarinda
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	505.925.000	3	1.150.000.000	3	300.108.313	3	345.124.400	3	405.000.000	3	2.706.157.713	UPTD PBP	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	4	24	46.500.000	18	350.000.000	21	61.496.250	24	70.720.600	27	85.000.000	114	613.716.850		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	180.425.000	12	800.000.000	12	238.612.063	12	274.403.800	12	320.000.000	12	1.813.440.863		Samarinda
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.08.03	3. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (Dua) Petugas Lapang (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	-	7	279.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	279.000.000		Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	379.280.000	20	600.000.000	20	501.597.800	20	576.837.400	20	710.000.000	100	2.767.715.200	UPTD PBP	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	162.780.000	4	300.000.000	4	215.276.550	4	247.568.000	4	380.000.000	4	1.305.624.550		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4		4			
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12		12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	216.500.000	50	300.000.000	50	286.321.250	50	329.269.400	50	330.000.000	250	1.462.090.650		Luar Provinsi
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	506.853.600	83	582.881.640	86	626.545.850	89	770.861.200	92	901.333.000	92	3.388.475.290	UPTD P2TP	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	506.853.600	12	582.881.640	12	626.545.850	12	770.861.200	12	901.333.000	12	3.388.475.290		Samarinda
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	394.280.000	3	1.713.958.830	3	800.435.300	3	878.650.500	3	1.079.000.000	3	4.866.324.630	UPTD P2TP	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)		9	169.900.000	9	355.921.830	9	224.692.750	9	258.396.600	9	350.000.000	45	1.358.911.180		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	224.380.000	12	1.079.037.000	12	296.742.550	12	341.253.900	12	450.000.000	12	2.391.413.450		Samarinda
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.08.04	3. Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)	Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)	-	-	-	2	279.000.000	2	279.000.000	2	279.000.000	2	279.000.000	8	1.116.000.000		Samarinda, Kukar
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	267.210.000	20	400.000.000	20	353.385.300	20	406.392.900	20	470.000.000	100	1.896.988.200	UPTD P2TP	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	212.210.000	4	300.000.000	4	280.647.800	4	322.744.800	4	370.000.000	4	1.485.602.600		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4		4			
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12		12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	55.000.000	50	100.000.000	50	72.737.500	50	83.648.100	50	100.000.000	250	411.385.600		Luar Provinsi

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	-	-	83	271.049.300	86	276.234.000	89	200.000.000	92	580.000.000	92	1.327.283.300	UPTD PBTP	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)				12	271.049.300	12	276.234.000	12	200.000.000	12	580.000.000	12	1.327.283.300		Samarinda, Kukar
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	-	-	3	460.963.750	3	500.308.200	3	470.720.600	3	585.000.000	3	2.016.992.550	UPTD PBTP	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)				2	53.475.000	3	61.696.200	4	70.720.600	5	85.000.000	14	270.891.800		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)				12	207.488.750	12	238.612.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	946.100.750		Samarinda, Kukar
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.08.04	3. Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)	Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000		Samarinda, Kukar
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	-	-	20	336.172.000	20	279.280.000	20	312.780.000	20	470.000.000	100	1.398.232.000	UPTD PBTP	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)				4	187.197.000	4	162.780.000	4	162.780.000	4	290.000.000	4	802.757.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)				4		4		4		4		4			
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)				12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)				50	148.975.000	50	116.500.000	50	150.000.000	50	180.000.000	200	595.475.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan			Nilai produk lapangan usaha sub sektor perke-bunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544		18.773		20.087		21.493		22.997		22.997				
		3.03.01.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	13.249.959	15.288.465	14.977.395.000	16.812.938	21.805.111.250	17.136.849	16.717.791.000	18.126.490	16.717.791.000	18.313.874	18.472.673.000	18.313.874	88.690.761.250	Bid. Pengembangan Komoditi		
				a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	13.164.310	15.197.504		16.717.254		17.036.402		18.020.894		18.197.504		18.197.504				
				b. Karet (Ton)	63.510	70.533		74.060		77.763		81.651		90.000		90.000				
				c. Kelapa (Ton)	13.647	12.105		12.468		12.479		12.500		12.853		12.853				
				d. Kakao (Ton)	2.435	3.006		3.307		3.771		4.368		5.000		5.000				
				e. Lada (Ton)	6.057	5.317		5.849		6.434		7.077		8.517		8.517				
		3.03.01.58.04	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)			7.702.500.000		8.155.800.000		6.500.000.000		6.500.000.000		8.000.000.000		36.858.300.000		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan, Samarinda	
				a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	16,70	19,00		19,5		20,00		21,00		22,00		22,00				
				b. Karet (Ton/Ha)	1,28	1,30		1,35		1,40		1,45		1,50		1,50				
				c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	0,77		0,80		0,82		0,85		0,90		0,90				
				d. Kakao (Ton/Ha)	0,50	0,68		0,70		0,75		0,80		0,85		0,85				
				e. Lada (Ton/Ha)	0,99	1,10		1,15		1,18		1,19		1,20		1,20				
		3.03.01.58.05	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Jumlah luas kebun (Ha)	3.390	570	7.274.895.000	720	11.900.420.000	620	8.468.900.000	620	8.468.900.000	620	8.723.782.000	3.150	44.836.897.000		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Mahulu, Samarinda	
				a. Kelapa Sawit (Ha)	1.905	100		150		200		200		200		850				
				b. Karet (Ha)	1.395	300		200		200		200		200		1.100				
				c. Kelapa (Ha)	90	20		20		20		20		20		100				
				d. Kakao (Ha)	-	100		150		100		100		100		550				
				e. Lada (Ha)	50	50		200		100		100		100		550				
		3.03.01.58.06	3. Pengembangan kelembagaan pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)			20	1.748.891.250	24	1.748.891.000	28	1.748.891.000	32	1.748.891.000	104	6.995.564.250		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Mahulu, Balikpapan, Samarinda		
		3.03.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	19	2	228.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	228.075.000		Bid. Pengembangan Komoditi	
		3.03.01.68.02	1. Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)	475	25	228.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	228.075.000			Berau, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan (Orang)	60	25	355.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	355.775.000	Bid. Pengembangan Komoditi	
		3.03.01.78.01	1. Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	64	25	355.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	355.775.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Gabungan Kelompok Tani yang mandiri (Gapoktan)	-	5	339.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	339.425.000	Bid. Pengembangan Komoditi	
		3.03.01.79.01	1. Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	-	30	339.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	339.425.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	75	1.495.388.000	85	1.618.306.800	90	1.618.306.800	95	1.518.306.800	100	1.665.000.000	100	7.915.308.400	Bid. Pengembangan Komoditi (Th 1), UPTD PBTP (Th 2-5)	
		2.1.03.88.01	1. Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115.000	25.000	1.175.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	1.175.073.000		Kukar
		2.1.03.88.02	2. Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara(Ha)	-	11,5	320.315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	320.315.000		Kukar
		3.03.01.88.03	3. Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	100.000	-	-	132.000	903.306.800	132.000	903.306.800	132.000	853.306.800	133.000	950.000.000	529.000	3.609.920.400		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				a. Kelapa Sawit (benih)	25.000	-	-	50.000		50.000		50.000		50.000		200.000			
				b. Karet (benih)	50.000	-	-	50.000		50.000		50.000		50.000		200.000			
				c. Kelapa (benih)	-	-	-	2.000		2.000		2.000		3.000		9.000			
				d. Kakao (benih)	-	-	-	20.000		20.000		20.000		20.000		80.000			
				e. Aren (benih)	25.000	-	-	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000			
		3.03.01.88.04	4. Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	15.000	-	-	45.000	715.000.000	45.000	715.000.000	45.000	665.000.000	45.000	715.000.000	180.000	2.810.000.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				a. Lada (benih)	15.000	-	-	25.000		25.000		25.000		25.000		100.000			
				b. Pala (benih)	-	-	-	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000			
				c. Sereh wangi (benih)	-	-	-	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000			

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih illegal (Kasus)	4	2	626.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	626.260.000	UPTD PBP	
		3.03.01.84.01	1. Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	2	2	219.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	219.860.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.84.02	2. Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	5.350.000	2.000.000	406.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	406.400.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	2.000.000	401.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	401.105.000	UPTD PBP	
		3.03.01.85.01	1. Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	1	1	120.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.100.000		Kukar, Kutim, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.85.02	2. Sertifikasi benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	5.000.000	2.000.000	281.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	281.005.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)	2.825.176	-	-	2.905.176	1.729.171.000	2.945.176	1.327.631.500	2.985.176	1.526.776.500	3.025.176	1.700.000.000	11.860.704	6.283.579.000	UPTD PBP	
		3.03.01.94.01	1. Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	4,08	-	-	3,08	880.316.250	2,58	758.255.000	2,08	871.993.600	1,58	950.000.000	1,58	3.460.564.850		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.94.02	2. Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	2.725.176	-	-	2.000.000	848.854.750	2.000.000	569.376.500	2.000.000	654.782.900	2.000.000	750.000.000	8.000.000	2.823.014.150		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan			Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	38	43		48		53		58		63		63			
		3.03.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang berhasil ditangani (%)	5,3	20	148.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	148.450.000	Bid. Usaha	
		3.03.01.60.04	1. Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	5,3	20	148.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	148.450.000		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Mahulu
		3.03.01.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	1,87	4,785	275.800.000	4,08	977.500.000	4,07	977.500.000	4,06	1.020.000.000	4,04	1.490.000.000	4,04	4.740.800.000	Bid. Perkebunan	
		3.03.01.76.01	1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	6	1	142.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	142.400.000		Berau, Kukar, Paser
		3.03.01.76.03	2 Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Luas area yang ditanami (Ha)	75	50.000	133.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	133.400.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda
		3.03.01.76.04	3 Pengembangan EBT pada sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	5	-	-	2	345.000.000	3	345.000.000	3	350.000.000	3	525.000.000	11	1.565.000.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda
		3.03.01.76.05	4 Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	100.622	-	-	101.500	287.500.000	102.000	287.500.000	102.500	300.000.000	103.000	440.000.000	103.000	1.315.000.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Samarinda
		3.03.01.76.05	5 Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	12	-	-	15	345.000.000	15	345.000.000	15	370.000.000	15	525.000.000	60	1.585.000.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	50	247.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	247.750.000	Bid. Perkebunan Berkelanjutan	
		3.03.01.77.01	1. Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	100	60	99.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	99.750.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Paser, Samarinda
		3.03.01.77.02	2. Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	215	130	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130	148.000.000		Kukar, Samarinda
		3.03.01.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah Perusahaan yang mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	98	32	542.400.000	35	1.010.821.250	35	1.010.821.000	35	1.150.000.000	35	1.537.331.000	172	5.251.373.250	Bid. Usaha	
		3.03.01.80.01	1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	2	2	146.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	146.850.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.80.02	2. Pelayanan adminitrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	2	10	114.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	114.350.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda, Balikpapan
		3.03.01.80.03	3. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	-	20	281.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	281.200.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.80.04	4. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	9	-	-	30	301.990.000	40	301.990.000	50	350.000.000	60	459.289.000	60	1.413.269.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.80.05	5. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	8	-	-	5	162.581.250	5	162.581.000	5	200.000.000	5	247.265.000	20	772.427.250		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.80.06	6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	98	-	-	52	546.250.000	52	546.250.000	52	600.000.000	52	830.777.000	208	2.523.277.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	400	20	276.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	276.675.000	Bid. Usaha	
		3.03.01.81.01	1. Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	400	20	276.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	276.675.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	347.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	347.250.000	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.82.01	1. Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	5	178.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	178.710.000		PPU, Samarinda
		3.03.01.82.02	2. Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	-	15	168.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	168.540.000		PPU, Balikpapan, Samarinda
		3.03.01.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	-	40	271.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40	271.500.000	Bid. Perkebunan Berkelanjutan	
		3.03.01.83.01	1. Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (ha)	128,8	99	271.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	99	271.500.000		Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	25	461.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	461.284.000	UPTD P2TP	
		3.03.01.86.01	1. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok Tani)	25	25	461.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	461.284.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	2.500	5.000	425.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	425.060.000	UPTD P2TP	
		2.1.03.87.01	1. Pengembangan dan Perbanyakkan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH/BP (Kg)	2.500	5.000	425.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	425.060.000		Kubar, Kutim, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	2.085.338.000	-	-	1.087.534.440	1.303.159.530	1.047.138.860	1.219.633.550	916.648.000	1.444.428.400	774.940.000	1.571.000.000	3.826.261.300	5.538.221.480	UPTD P2TP	
		3.03.01.95.01	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	500	-	-	229	641.125.000	220	598.293.750	195	708.887.800	156	761.000.000	156	2.709.306.550		Berau, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Samarinda
		3.03.01.95.02	2. Perbanyakkan Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)		-	-		662.034.530		621.339.800		735.540.600		810.000.000		2.828.914.930		Berau, Kukar, Ktim, Balikpapan, Samarinda
				- APH Padat (Kg)	20.000	-	-	5.000		5.000		5.000		5.000		20.000			
				- APH Cair (Liter)	500	-	-	500		500		500		500		2.000			

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya kesejahteraan pekebun			NTP Pekebun (%)	88,5	89		92		95		98		100		100			
		3.03.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang memiliki sertifikat (%)	20	30	903.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	903.760.000	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.61.01	1. Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	3	774.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	774.850.000		Kutim, Samarinda
		3.03.01.61.04	2. Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	-	2	128.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	128.910.000		Mahulu, Samarinda
		3.03.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	223.710.500	-	-	-	-	-	-	-	-	5	223.710.500	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.62.04	1. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	5	2	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101.000.000		Kukar, Samarinda
		3.03.01.62.05	2. Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11	11	122.710.500	-	-	-	-	-	-	-	-	11	122.710.500		Kukar, Paser, PPU, Bontang, Samarinda
		3.03.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	5	395.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	395.800.000	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.65.05	1. Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	17	50	231.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	231.950.000		Berau, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Samarinda
		3.03.01.65.06	2. Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	5	2	163.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	163.850.000		Berau, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Samarinda, Balikpapan
		3.03.01.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	-	-	-	2	2.251.383.750	2	2.251.383.000	3	2.400.000.000	3	3.424.072.000	10	10.326.838.750	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.93.01	1. Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	-	-	-	3	852.638.750	4	852.638.000	4	900.000.000	5	1.296.756.000	16	3.902.032.750		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.93.02	2. Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	21	-	-	2	763.600.000	3	763.600.000	3	800.000.000	4	1.161.340.000	12	3.488.540.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.93.03	3. Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	5	-	-	10	635.145.000	10	635.145.000	10	700.000.000	10	965.976.000	40	2.936.266.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
TOTAL							32.897.850.000		44.905.405.000		38.500.000.000		39.446.641.950		46.409.587.380		202.159.484.330		

## Bab 7. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat segera diketahui dan diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perkebunan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas

dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Eselon II</b>							
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544	18.773	20.087	21.493	22.997	22.997
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat ISPO (Perusahaan)	38	43	48	53	58	63	63
NTP Pekebun (%)	88,45	89	92	95	98	100	100
<b>Eselon III</b>							
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	5	5	5	5	5	5
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	15	24	18	21	24	27	114
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	50	50	50	50	250
Jumlah pakaian dinas (Stell)		460		460		460	1.380
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)</b>	<b>58,83</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	50	10	10	10	10	10	50
jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	20	4	4	4	4	4	20
<b>Produksi komoditas perkebunan (Ton)</b>	<b>13.249.959</b>	<b>15.288.465</b>	<b>16.812.938</b>	<b>17.136.849</b>	<b>18.126.490</b>	<b>18.313.874</b>	<b>18.313.874</b>
<b>a. Kelapa Sawit (Ton TBS)</b>	<b>13.164.310</b>	<b>15.197.504</b>	<b>16.717.254</b>	<b>17.036.402</b>	<b>18.020.894</b>	<b>18.197.504</b>	<b>18.197.504</b>
<b>b. Karet (Ton)</b>	<b>63.510</b>	<b>70.533</b>	<b>74.060</b>	<b>77.763</b>	<b>81.651</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>c. Kelapa (Ton)</b>	<b>13.647</b>	<b>12.105</b>	<b>12.468</b>	<b>12.479</b>	<b>12.500</b>	<b>12.853</b>	<b>12.853</b>
<b>d. Kakao (Ton)</b>	<b>2.435</b>	<b>3.006</b>	<b>3.307</b>	<b>3.771</b>	<b>4.368</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>e. Lada (Ton)</b>	<b>6.057</b>	<b>5.317</b>	<b>5.849</b>	<b>6.434</b>	<b>7.077</b>	<b>8.517</b>	<b>8.517</b>
Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)							
a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	16,70	19,00	19,5	20,00	21,00	22,00	22,00
b. Karet (Ton/Ha)	1,28	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,50
c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	0,77	0,80	0,82	0,85	0,90	0,90
d. Kakao (Ton/Ha)	0,50	0,68	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
e. Lada (Ton/Ha)	0,99	1,10	1,15	1,18	1,19	1,20	1,20
Jumlah luas kebun (Ha)	3.390	570	720	620	620	620	3.150
a. Kelapa Sawit (Ha)	1.905	100	150	200	200	200	850
b. Karet (Ha)	1.395	300	200	200	200	200	1.100
c. Kelapa (Ha)	90	20	20	20	20	20	100
d. Kakao (Ha)	-	100	150	100	100	100	550
e. Lada (Ha)	50	50	200	100	100	100	550
Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)			20	24	28	32	104
<b>Persentase konflik yang berhasil ditangani (%)</b>	<b>5,3</b>	<b>20</b>	-	-	-	-	<b>20</b>
Persentase konflik yang ditangani (%)	5,3	20	-	-	-	-	20
<b>Persentase Produk yang memiliki sertifikat (%)</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	<b>30</b>
Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	3	-	-	-	-	3
Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	-	2	-	-	-	-	2

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	-	-	-	-	5
Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	5	2	-	-	-	-	2
Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11	11	-	-	-	-	11
Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	5	-	-	-	-	5
Jumlah transaksi (Transaksi)	17	50	-	-	-	-	50
Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	5	2	-	-	-	-	2
Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	19	2	-	-	-	-	2
Jumlah orang terlatih (Orang)	475	25	-	-	-	-	25
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	1,87	4,785	4,08	4,07	4,06	4,04	4,04
Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	6	1	-	-	-	-	1
Luas area yang ditanami (Ha)	75	50.000	-	-	-	-	50.000
Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	5	-	2	3	3	3	11
luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	100.622	-	101.500	102.000	102.500	103.000	103.000
Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	12	-	15	15	15	15	60
Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	50	-	-	-	-	50
Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	100	60	-	-	-	-	60
Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	215	130	-	-	-	-	130
Jumlah petugas dan tenaga teknis yang terampil (Orang)	60	25	-	-	-	-	25
Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	64	25	-	-	-	-	25
Gabungan Kelompok Tani yang mandiri (Gapoktan)	-	5	-	-	-	-	5
Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	-	30	-	-	-	-	30

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Perusahaan yang mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	98	32	35	35	35	35	172
Jumlah database dan data spasial (Database)	2	2	-	-	-	-	2
Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	2	10	-	-	-	-	10
Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	-	20	-	-	-	-	20
Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	9	-	30	40	50	60	60
Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	8	-	5	5	5	5	20
Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	98	-	52	52	52	52	208
Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	400	20	-	-	-	-	20
Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	400	20	-	-	-	-	20
Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	-	-	-	-	5
Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	5	-	-	-	-	5
Persentase peningkatan produksi (%)	-	15	-	-	-	-	15
Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	-	40	-	-	-	-	40
Luas kebakaran kebun (ha)	128,8	99	-	-	-	-	99
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	75	-	-	-	-	75
Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115.000	25.000	-	-	-	-	25.000
Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara(Ha)	-	11,5	-	-	-	-	11,5
Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	-	-	2	2	3	3	10
Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	-	-	3	4	4	5	16
Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	21	-	2	3	3	4	12
Jumlah promosi yang diikuti (event)	5	-	10	10	10	10	40

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	-	80	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	3	3	3	3	3
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	4	24	18	21	24	27	114
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12	12	12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	-	7	-	-	-	-	7
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	50	50	50	50	250
Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	4	2	-	-	-	-	2
Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	2	2	-	-	-	-	2
Jumlah benih yang diawasi (Benih)	5.350.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	1	1	-	-	-	-	1
jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	5.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Jumlah benih yang beredar (benih)	2.825.176	-	2.905.176	2.945.176	2.985.176	3.025.176	11.860.704
Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	4,08	-	3,08	2,58	2,08	1,58	1,58
Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	2.725.176	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	-	80	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	3	3	3	3	3
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)		9	9	9	9	9	45
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)	-	-	2	2	2	2	8
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	50	50	50	50	250
Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	25	-	-	-	-	25
Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok Tani)	25	25	-	-	-	-	25
Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	2.500	5.000	-	-	-	-	5.000
Jumlah APH/BP (Kg)	2.500	5.000	-	-	-	-	5.000
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	2.085.338.000	-	1.087.534.440	1.047.138.860	916.648.000	774.940.000	3.826.261.300
Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	500	-	229	220	195	156	156
Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)		-					
- APH Padat (Kg)	20.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
- APH Cair (Liter)	500	-	500	500	500	500	2.000

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	-	-	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)			12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	-	3	3	3	3	3
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)			2	3	4	5	14
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)			12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)	-	-	2	2	2	2	8
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	-	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)			4	4	4	4	4
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)			4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)			12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)			50	50	50	50	200
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	-	85	90	95	100	100
Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	100.000	-	132.000	132.000	132.000	133.000	529.000
a. Kelapa Sawit (benih)	25.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
b. Karet (benih)	50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
c. Kelapa (benih)	-	-	2.000	2.000	2.000	3.000	9.000
d. Kakao (benih)	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
e. Aren (benih)	25.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	15.000	-	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
a. Lada (benih)	15.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
b. Pala (benih)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
c. Sereh wangi (benih)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

## Bab 8. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan berbagai kebijakan pengembangan sub sektor perkebunan dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menuju masyarakat yang sejahtera.

Keberhasilan implementasi Renstra Dinas Perkebunan sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh segenap unsur dalam lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan dukungan oleh semua pihak demi tercapainya perekonomian Kalimantan Timur yang tangguh dimana salah satunya berbasis rendah emisi.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan. Sasaran utama dari Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 selaku lembaga yang diberikan kewenangan dibidang perkebunan adalah memastikan bahwa komoditas perkebunan dapat meningkatkan perekonomian berbasis rendah emisi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah (PD) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tidak bersifat kaku dan senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat diharapkan. Dengan

demikian, penting bagi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengedepankan aspek perencanaan beserta fungsi pengendalian dan evaluasinya agar semua program kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan waktunya.

### **Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra. Setelah RPJMD Tahun 2019-2023 ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, kepala Dinas Perkebunan menetapkan Renstra Dinas Perkebunan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perkebunan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) yang merujuk pada tabel 4.1 pada Bab IV Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) yang merujuk berdasarkan kajian tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang terdapat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan setiap tahun melalui DPA-Dinas Perkebunan;
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perkebunan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perkebunan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perkebunan; dan
6. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Perkebunan akan mendapatkan rekomendasi tentang pelaksanaan Renstra melalui Renja. Dengan berdasarkan rekomendasi tersebut Dinas Perkebunan dapat menentukan untuk melanjutkan kebijakan atau harus melakukan perubahan kebijakan dan program pembangunan yang dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan periode berikutnya.